DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI V DPR RI DENGAN SEKJEN, DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT, DAN DIRJEN PERKERETAAPIAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI

Tahun Sidang	:	2022-2023
Masa Persidangan	:	I
Rapat Ke-	:	
Jenis Rapat	:	RDP
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari, Tanggal	:	Rabu, 7 September 2022
Waktu	:	Pukul 14.00 s.d. 17.00 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi V DPR RI, (Ruang KK V) Gedung Nusantara DPR RI dan Secara Virtual *Zoom Cloud Meeting*
Ketua Rapat	:	Lasarus, S.Sos., M.Si. (F-PDIP) – Ketua Komisi V DPR RI
Acara	:	1. Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2022 sampai bulan Agustus 2022; 2. Membahas alokasi anggaran menurut fungsi dan program masing-masing unit Eselon I K/L Mitra Kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN TA. 2023 3. Membahas usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi
Sekretaris Rapat	:	Nunik Prihatin Budiastuti, S.H., Kabag Komisi V DPR RI
Hadir	:	A. Anggota DPR RI: 38 dari 55 orang Anggota dengan rincian: 1. FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP) 8 dari 11 orang Anggota 1. Bob Andika Mamana Sitepu, S.H. 2. Mochamad Herviano 3. Hj. Sadarestuwati, S.P., M.MA. 4. Sarce Bandaso Tandiasik, S.H., M.H. 5. Sri Rahayu 6. H. Irmadi Lubis 7. Ir. Effendi Sianipar 8. Harvey B. Malaihollo

2. FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)
   6 dari 8 orang Anggota
   1. Ir. Ridwan Bae
   2. Drs. Hamka B Kady, M.S.
   3. DR. H. Ali Mufthi, S.AG., M.Si.
   4. H. Tubagus Haerul Jaman, S.E.
   5. Muhammad Fauzi, S.E.
   6. Ir. H. Anang Susanto, M.Si.

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA (F-GERINDRA)
   5 dari 7 orang Anggota
   1. H. Andi Iwan Darmawan Aras, S.E., M.Si.
   2. Ir. Sumail Abdullah
   3. Sudewo, S.T., M.T.
   4. Ir. Eddy Santana Putra, M.T.
   5. Drs. H. Mulyadi, M.MA.

4. FRAKSI PARTAI NASDEM (F-NASDEM)
   4 dari 6 orang Anggota
   1. Roberth Rouw
   2. Drs. H. Tamanuri, M.M.
   3. H. Syarif Abdullah Alkadrie, S.H., M.H.
   4. Drs. H. Soehartono, M.Si.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)
   5 dari 6 orang Anggota
   1. H. Ruslan M. Daud
   2. H. Irmawan, S.Sos., M.M.
   3. Sofyan Ali, S.H.
   4. Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, M.M.
   5. H. Syafiuddin, S.Sos.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)
   4 dari 5 orang Anggota
   1. Dr. H. Irwan S.IP., M.P.
   2. Willem Wandik
   3. drh. Jhonni Allen Marbun, M.M.
   4. Lasmi Indaryani, S.E.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)
   2 dari 5 orang Anggota
   1. Ir. H. Sigit Sosiantomo
   2. Dr. H. SYAHRUL Aidi Maazat, Lc., M.A.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)
   3 dari 5 orang Anggota
   1. Athari Ghauthi Ardi
   2. Hj. Hanna Gayatri, S.H.
   3. H. Boyman Harun, S.H.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)
   1 dari 2 orang Anggota
   1. Dr. H. Muh Aras, S.Pd., M.M.

B. UNDANGAN:
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan RI (Ir. Novie Riyanto Rahardjo, MSEA)
2. Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI (Drs. Hendro Sugiatno, M.M.)
3. Plt. Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan RI (Zulmafendi, S.E., M.Sc.)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT / F - PDIP (LASARUS, S.Sos., M.Si.) – KETUA KOMISI V DPR RI:

Baik Bapak-Ibu sekalian, kita mulai rapat kita pada siang hari ini.

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua,

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI,
Yang terhormat Saudara Sekjen, Dirjen Perhubungan Darat dan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan beserta seluruh jajarannya,
Hadirin yang berbahagia,

Mengawali rapat hari ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena berkat dan limpah-Nya kita dapat bertemu untuk melaksanakan rapat sesuai dengan undangan yang sudah kami sampaikan.

Menurut laporan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, bahwa rapat ini dihadiri oleh 35 Anggota Komisi V DPR RI dengan rincian 15 orang hadir secara fisik dan 20 orang hadir secara virtual terdiri dari 9 unsur fraksi yang berbeda. Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 281 Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, rapat ini sudah memenuhi kuorum. Dan, izinkanlah kami membuka Rapat Dengar Pendapat hari ini. Dan sesuai dengan

Pasal 276 ayat (1) Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI pada hari ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PADA PUKUL 14.00 WIB)

Kami ucapkan terima kasih kepada Saudara Sekjen, Dirjen Perhubungan Darat dan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan beserta jajarannya yang hadir secara fisik. Dan, Para Kepala Balai Transportasi Darat seluruh Indonesia, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian seluruh Indonesia yang hadir secara virtual yang telah memenuhi undangan kami untuk melaksanakan rapat pada siang hari ini. Dengan agenda membahas evaluasi pelaksanaan APBN Tahun 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022, alokasi anggaran menurut fungsi dan program masing-masing unit Eselon I mitra kerja Komisi V DPR RI dalam nota keuangan RAPBN Tahun 2023 dan usulan program-program yang akan dilaksanakan atau didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari komisi.

Pimpinan, Anggota Komisi V, Sekjen, Para Dirjen beserta seluruh jajaran, Hadirin yang berbahagia,

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Perhubungan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 yang lalu. Telah disepakati beberapa hal di antaranya Komisi V DPR RI memahami penjelasan Kementerian Perhubungan mengenai alokasi anggaran Kementerian Perhubungan dalam nota keuangan RAPBN Tahun 2023 sebesar Rp33,4 triliun.

Dari alokasi tersebut anggaran untuk Sekretariat Jenderal sebesar Rp541 miliar yang akan dipergunakan untuk mendukung kegiatan antara lain:
- Layanan dukungan manajemen perencanaan dan kerja sama;
- Rekrutmen dan pengangkatan pegawai;
- Kerja sama kemitraan serta operasional; dan
- Pemeliharaan kantor Kementerian Perhubungan.

Sementara realisasi anggaran Sekeretariat Jenderal dalam APBN Tahun 2022 per Agustus 2022 adalah sebesar 62,64%.

Selanjutnya anggaran Dirjen Perhubungan Darat sebesar Rp5,4 triliun yang akan dipergunakan untuk mendukung kegiatan antara lain:
- Dukungan 9 kawasan strategis pariwisata nasional;
- Pengadaan bus sekolah;
- Dukungan BTS di 10 Kota;
- Subsidi angkutan jalan multi moda dan angkutan barang; serta
- Pembangunan fasilitas keselamatan jalan.

Sementara realisasi anggaran Dirjen Perhubungan Darat dalam APBN Tahun 2022 per bulan Agustus 2022 adalah sebesar 51,45%.

Sedangkan Dirjen Perkeretaapian memperoleh anggaran sebesar Rp7,2 triliun yang akan dipergunakan untuk mendukung kegiatan di antaranya:

- Pembangunan prasarana kereta api;
- Peningkatan kapasitas prasarana dan keselamatan perkerataapian; dan
- Perintis kereta api.

Sementara realisasi anggaran Dirjen Perkeretaapian dalam APBN tahun 2022 per Agustus 2022 adalah sebesar 47,01%.

Sejalan dengan itu dalam kesempatan ini kami tegaskan kembali agar dalam proses penyusunan anggaran tahun 2023 agar tiap-tiap unit organisasi Eselon I Kementerian Perhubungan benar-benar dapat memperhatikan dan mengakomodir saran, pendapat, dan masukan Komisi V DPR RI. Rapat kita pada hari ini Pak Sekjen, poin pentingnya pada alinea terakhir ini, Pak, ya. Dalam RAPBN tahun 2023 agar tiap-tiap unit Eselon I memperhatikan saran, pendapat, masukan dari Komisi V DPR RI.

Selanjutnya, berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi V DPR RI terdapat sejumlah permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dari Sekjen, Dirjen Perhubungan Darat, dan Dirjen Perkeretaapian antara lain:

1. Perlu adanya peningkatan koordinasi baik secara internal maupun eksternal agar terwujud pola kerja yang lebih efektif dan efisien.
2. Perlunya meningkatkan dukungan fasilitas keselamatan jalan.
3. Dukungan integrasi stasiun dengan angkutan massal disertakan dengan layanan kereta api di wilayah-wilayah perlu mendapat penjelasan.

Saya bacakan lagi poin yang ketiga ini, dukungan integrasi stasiun dengan angkutan massal disertakan dengan layanan kereta api di wilayah-wilayah perlu mendapat penjelasan.

Saudara-Saudara yang kami hormati,

Demikianlah pengantar rapat kita pada siang hari ini. Untuk mempersingkat waktu saya berikan kesempatan kepada Saudara Sekjen untuk menyampaikan paparannya. Pak Sekjen, kami minta yang disampaikan hari ini adalah sesuai dengan agenda rapat kita Pak, ya, yang di luar agenda rapat nanti kita bahas pada rapat-rapat berikutnya biar rapat ini efektif dan efisien. Saya persilakan Saudara Sekjen untuk menyampaikan paparannya sesuai dengan agenda rapat kita pada hari ini. Setelah Saudara Sekjen nanti dilanjutkan oleh Dirjen Perhubungan Darat dan terakhir nanti dari Dirjen Perkeretaapian.

Saya persilakan.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI (Ir. NOVIE RIYANTO RAHARDJO, MSEA.):

Terima kasih.

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua,
Shalom, om swastiastu, namo buddhaya,
Salam kebajikan, salam kebangsaan dan salam sehat serta hormat kami,

Yang saya hormati Bapak Ketua, Para Wakil Ketua beserta Bapak-Ibu Anggota Komisi V DPR RI,

Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya. Sehingga kita semua dapat menghadiri Rapat Dengar Pendapat Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022 dan rencana alokasi anggaran Sekretariat Jenderal tahun 2023 dalam keadaan sehat wal'afiat. Pada kesempatan yang berbahagia ini izinkanlah saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI atas dukungan, sinergi dan kolaborasi yang baik selama ini sehingga terbangun kemitraan yang kondusif dan kolaboratif dalam mendorong kemajuan sektor transportasi nasional.

Bapak Ketua, Wakil Ketua dan Para Anggota Komisi V DPR RI yang saya hormati,

Sesuai dengan agenda rapat dengar pendapat pada hari ini, izinkan saya menyampaikan pemaparan secara singkat perihal evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan Agustus dan rencana alokasi Anggaran Tahun 2023 pada Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan sebagai berikut:

Merujuk peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. Sekjen Kemenhub bertugas melaksanakan dan menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan meliputi:

- aspek penyusunan rencana,
- program dan anggaran,
- ketatausahaan,
- kepegawaian,
- keuangan,
- kerumahtanggaan,
- kerja sama,
- hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi,
- penataan organisasi,
- penyusunan perundang-undangan,
- pengelolaan barang milik negara dan layanan pengadaan barang dan jasa Pemerintah, serta;
- pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Menteri Perhubungan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri no.17 tahun 2022 yang diundangkan pada tanggal 26 Agustus 2022, Sekjen yang sebelumnya terdiri dari 12 unit kerja menjadi 14 unit kerja. Yaitu 7 Biro, 5 Pusat, dan 2 Lembaga non-struktural. Serta di bawah unit kerja PFKKI terdapat 8 atase perhubungan yang berlokasi di Singapore, Kuala Lumpur, Tokyo, Den Haag, London, Montreal, Washington, dan Jeddah.

Bapak Ketua, Wakil Ketua, dan Para Anggota Komisi V DPR RI yang saya hormati,

Pada tahun 2022 ini terjadi perubahan dan penyesuaian pagu anggaran Sekretariat Jenderal dari pagu awal sebesar Rp505,37 miliar menjadi pagu efektif sebesar Rp479,66 miliar. Hal ini antara lain disebabkan karena terdapat kebijakan *automatic adjustment* sebesar Rp37,24 miliar yang dilakukan sebanyak 2 tahap. Yaitu, tahap 1 sebesar Rp10,107 miliar dan tahap 2 sebesar Rp27,133 miliar. Selain itu perubahan juga terjadi karena adanya pembukaan blokir *automatic adjustment* sebesar Rp11,530 miliar untuk pemenuhan pendanaan kekurangan belanja pegawai.

Selanjutnya, realisasi kinerja anggaran sekjen sampai dengan 31 Agustus 2022 berdasarkan pencatatan dalam aplikasi Span Kemenkeu adalah sebesar 62,64% atau Rp300,43 miliar dengan realiasi belanja pegawai sebesar 70,9%, belanja barang 60,7% dan belanja modal sebesar 46,3%. Adapun realisasi PNBP Sekjen tahun 2022 sampai dengan posisi 1 September 2022 adalah sebesar Rp3,699 miliar atau mencapai 110,21% dibandingkan target sebesar Rp3,356 miliar. Kami optimis bahwa realisasi PNBP akan terus meningkat sampai dengan akhir tahun.

Bapak Ketua, Wakil Ketua dan Para Anggota Komisi V DPR RI yang saya hormati,

Terkait dengan Program Kerja Tahun 2023 berdasarkan surat Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S617/MK.02/2022 dan Nomor B577/MPPN/D.8/PP.0402/07 2022 tanggal 27 Juli 2022, total pagu anggaran Kementerian Perhubungan Tahun 2023 sebesar Rp33,44 triliun. Dari total pagu tersebut, alokasi anggaran Sekjen adalah sebesar Rp541,15 miliar. Perencanaan anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2023 sesuai dengan Renstra Sekjen adalah sebesar Rp956 miliar. Kemudian pagu kebutuhan 2023 yang diusulkan sebesar Rp1,35 triliun hingga ditetapkan pagu anggaran sebesar Rp541,15 triliun. Dengan demikian terdapat *gap* sebesar Rp812,33 miliar, mengingat dari pagu indikatif menuju pagu anggaran unit kerja sekjen tidak ada penambahan. Rincian komposisi Pagu Anggaran Sekjen Tahun 2023 berdasarkan jenis belanja adalah sebagai berikut:

- Belanja pegawai sebesar Rp123,61 miliar;
- Belanja barang operasional sebesar Rp169,06 miliar;
- Belanja barang non-operasional sebesar Rp192 miliar; dan
- Belanja modal sebesar Rp56,34 miliar.

Dengan pagu masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut:

- Biro Perencanaan sebesar Rp26,39 miliar;
- Biro SDM dan Organisasi sebesar Rp21,13 miliar;
- Biro Keuangan sebesar Rp19,31 miliar;
- Biro Hukum sebesar Rp12,5 miliar;
- Biro Umum sebesar Rp245,58 miliar;
- Biro KIP sebesar Rp27,37 miliar;
- Biro LPPBMN sebesar Rp22,99 miliar;
- Pusat PFKKI termasuk atase Perhubungan sebesar Rp33,39 miliar;
- Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan sebesar Rp13,5 miliar;
- Pusat Data dan Teknologi Informasi sebesar Rp59 miliar;
- Mahkamah Pelayaran sebesar Rp18,94 miliar; dan
- KNKT sebesar Rp40,21 miliar.

Selanjutnya, terkait dengan target dan prognosa PNBP tahun 2023. Sekjen memiliki target PNBP sebesar Rp3,092 miliar yang diperoleh dari jasa pemanfaatan aset BMN di lingkungan Sekjen non tusi dengan prognosa PNBP sebesar 100%.

Bapak Ketua, Wakil Ketua dan Para Anggota Komisi V DPR RI yang saya hormati.

Secara umum dapat juga saya sampaikan beberapa kegiatan prioritas di Sekjen pada tahun 2023, antara lain:

- Kegiatan perencanaan penganggaran serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran;
- Penyusunan dan penguatan regulasi sektor transportasi;
- Perencanaan, pengelolaan dan pembinaan SDM;
- Pelaksanaan kegiatan penatausahaan, pemeliharaan, dan pengasuransian aset berupa gedung di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- Publikasi sektor transportasi dan pelayanan kerja sama luar negeri dalam kerangka regional maupun sub regional, bilateral dan multilateral serta bantuan delegasi RI ke sidang nasional dan internasional;
- Penyiapan pengelolaan kebijakan lingkungan hidup dan peningkatan penguatan layanan digital sektor transportasi melalui pembangunan *command center*; kemudian
- Dukungan terhadap penyelenggaraan keselamatan dan keamanan sektor transportasi melalui peningkatan sistem investigasi kecelakaan transportasi; dan
- Pelaksanaan sidang pemeriksaan kecelakaan kapal laut.

Bapak Ketua, Wakil Ketua, dan Para Anggota Komisi V DPR RI yang saya hormati,

Mengakhiri penyampaian dalam rapat dengar pendapat ini, bersama ini dapat kami kemukakan bahwa, pertama, terhadap pelaksanaan anggaran tahun 2022 sampai dengan akhir tahun. Sekjen optimis mencapai sesuai dengan prognosa yaitu sebesar 98,01%. Masih terdapat *gap* antara pagu kebutuhan 2023 terhadap pagu anggaran sebesar Rp812 miliar. Sehingga bila

masih memungkinkan dibutuhkan penambahan anggaran untuk pembangunan *command center* dan peningkatan *big data* subsektor transportasi. Dengan adanya penataan kelembagaan setelah terbitnya peraturan Menteri Perhubungan No. 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. Di antaranya adalah perubahan Badan Litbang menjadi Badan Kebijakan Transportasi serta penguatan kelembagaan di lingkungan unit kerja Eselon II di lingkungan Sekjen. Yaitu pembentukan Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi, maka Sekjen akan melakukan *exercise* kembali pada pagu alokasi anggaran untuk mengakomodir penganggaran pada perubahan organisasi dimaksud.

Demikian Bapak-Ibu, yang dapat saya sampaikan, selanjutkan kami mohon masukan, saran dan pendapat dari Pimpinan dan Anggota untuk penyempurnaan peningkatan kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan di masa mendatang.

Tadi, melaksanakan arahan Ketua, bahwa kami juga menerima inspirasi dan masukan dari Bapak-Ibu Ketua serta Anggota Komisi V. Kami akan melakukan secara maksimal apa yang sudah menjadi arahan, masukan, dan inspirasi dari Bapak-Ibu Komisi V dalam RKA K/L 2023. Dan, semoga apa yang kita lakukan di RKA K/L 2023 berdasarkan masukan Bapak-Ibu sekalian akan memberikan manfaat untuk negara dan masyarakat RI di tahun 2023.

Terima kasih kami sampaikan.

Wabillahitaufik walhidayah,
Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Shalom,
Om shanti shanti om,
Namo buddhaya dan salam kebajikan.

Terima kasih, Bapak Ketua.

KETUA RAPAT:

Baik, ini yang bicara Pak Sekjen ini. Nanti yang akan menghimpun saran dan masukan, kita kasih *applause-lah*, Pak. Terima kasih Pak Sekjen, pasti seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi V menunggu kabar baiknya, Pak. Setelah nanti satu bulan diketok, baru muncul satuan tiga kan, *gitu*, Pak Hamka ya? Satuan tiganya nanti mudah-mudahan nanti tergambar apa yang tadi Pak Sekjen sampaikan. Begitu, Pak Roberth ya? Iya, saya kalau Pak Roberth sudah bilang iya damailah ruangan ini.

F – P.NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Sudah tergambarkan.

KETUA RAPAT:

Nah, agak manis Pak Roberth ini, Pak, kayaknya gara-gara makan jagung ini.

F – P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Kalau Kementerian Perhubungan itu *clear and clean*. Pak Sekjen sangat aspirasi kita semuanya tertampung dengan baik.

KETUA RAPAT:

Kita kasih *applause* buat Pak Roberth. Pendek…, alamat pendek rapat hari ini.

ANGGOTA KOMISI V DPR RI:

Kalau sudah Pimpinan nyuruh kasih *applause* ya bagaimana lagi kita ini kan. Yang oposisi ini ya tetap kasih *applause*.

KETUA RAPAT:

Tambah sore tambah asik. Baik, silakan Pak Dirjen Perhubungan Darat, Pak Hendro.

DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI (Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.):

Terima kasih, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan.

DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI (Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.):

Yang saya hormati Pak Ketua beserta Wakil Ketua,
Dan Bapak-Ibu Anggota Komisi V yang saya hormati,
Serta hadirin yang berbahagia,

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semuanya,
Om swastiastu, shalom.

Pada hari yang berbahagia ini terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan yang maha besar, atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita dapat bertemu dalam acara rapat dengar pendapat dengan Pimpinan beserta Anggota Komisi V DPR RI. Dan, saya mengucapkan

terima kasih atas saran dan kerja sama dalam mendukung kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Agenda rapat hari ini ada dua, yang pertama adalah evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022 sampai bulan Agustus 2022. Yang kedua, membahas alokasi anggaran menurut fungsi dan program masing-masing unit Eselon I Kementerian, mitra kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, dapat kami sampaikan bahwa kami juga turut menghadirkan para Eselon II di lingkungan Dirjen Perhubungan Darat beserta jajaran. Serta para Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat di seluruh Indonesia dan Kepala BPLJSKB Bekasi yang hadir secara virtual. Pertemuan rapat dengar pendapat ini juga merupakan kelanjutan dari rapat kerja Kementerian Perhubungan dengan Komisi V pada hari Rabu, 24 Agustus 2022. Pertanyaan dan masukan dari Anggota Dewan pada saat rapat dengan Kementerian Perhubungan telah kami pelajari untuk dilakukan proses tindak lanjut. Sehubungan dengan hal tersebut, perkenankan kami menyampaikan penjelasan secara garis besar terhadap materi yang telah diagendakan.

Bapak Ketua, Wakil Ketua, dan Para Anggota Komisi V DPR RI yang terhormat,

Pada kesempatan yang sangat baik ini izinkanlah kami menyampaikan evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022 dari pagu sebesar Rp5,395 triliun. Realisasi penyerapan keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2022 berdasarkan e-*monitoring* sampai dengan tanggal 6 September 2022 sebesar Rp2,775 triliun atau 51,45%. Dapat kami sampaikan dari pagu awal tahun ini, Dirjen Perhubungan Darat terkena *automatic adjustment* dalam 2 tahap, yaitu tahap 1 sebesar Rp211 miliar dan tahap 2 sebesar Rp314 miliar sehingga total adalah sebesar Rp525 miliar.

Selanjutnya, kami laporkan bahwa realisasi PNBP Dirjen Perhubungan Darat dalam 3 tahun terakhir yaitu 2019 sampai dengan 2021 selalu melebihi target yang ditetapkan. Realisasi PNBP per jasa pada Tahun Anggaran 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022 adalah sebesar Rp757,5 miliar atau 60,12% dari target total PNBP sebesar Rp1,260 triliun. Dirjen Perhubungan Darat akan mengupayakan secara terus menerus untuk percepatan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan seperti tahun sebelumnya. Realisasi ini belum maksimal, antara lain disebabkan oleh produksi dan penjualan kendaraan yang turun, pelaksanaan proses penyesuaian nilai jual kendaraan bermotor, serta adanya penyesuaian terhadap kebijakan pajak pertambahan nilai barang mewah.

Terkait dengan Program Padat Karya, Dirjen Perhubungan Darat sampai dengan tanggal 6 September 2022, pada 33 Provinsi di 318 Kabupaten/Kota dengan target pagu kegiatan sebesar Rp2,409 triliun. Telah terealisasi sebesar Rp1,196 triliun atau 49,65%. Sedangkan, target biaya upah sebesar Rp23,517 miliar telah terealisasi sebesar Rp9,849 miliar atau 41,88%.

Guna pencapaian target yang telah ditetapkan, kami mohon perkenankan dukungan segenap Pimpinan dan Anggota Komisi V. Untuk selanjutnya dalam pelaksanaan tersebut akan kami koordinasikan lebih lanjut untuk bersama-sama merealisasikan kegiatan pendukung padat karya ini.

Bapak Ketua, Wakil Ketua dan Para Anggota Komisi V DPR RI yang terhormat,

Sebagaimana agenda selanjutnya, izinkan kami paparkan program kerja pagu anggaran Dirjen Perhubungan Darat Tahun Anggaran 2023. Sesuai dengan tema RKP 2023 yaitu peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dari 7 prioritas nasional, pembangunan dan pelayanan sektor perhubungan darat memiliki peran dan tanggung jawab yang besar dalam peningkatan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar. Penyusunan rencana kerja dan anggaran, Tahun Anggaran 2023 diawali dengan pagu kebutuhan Dirjen Perhubungan Darat sebesar Rp14,084 triliun.

Selanjutnya, berdasarkan surat bersama Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Keuangan tanggal 18 April 2022 dan surat Menteri Perhubungan tanggal 27 Mei 2022 ditetapkan Pagu Indikatif Dirjen Perhubungan Darat sebesar Rp5,155 triliun. Pada tahap Pagu Anggaran sebagaimana surat-surat bersama Menteri Bappenas dan Menteri Keuangan tanggal 27 Juli 2022 dan surat Menteri Perhubungan tanggal 9 Agustus 2022, Dirjen Perhubungan Darat mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp305,6 miliar untuk kegiatan penyelenggaraan layanan keperintisan angkutan jalan dan penyeberangan, pengadaan fasilitas keselamatan serta dukungan pembangunan Ibu Kota Negara sehingga pagu anggaran Dirjen Perhubungan Darat menjadi Rp5,460 triliun.

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI, sehingga kami mendapatkan penambahan anggaran dan selanjutnya akan kami upayakan sepenuhnya untuk kemanfaatan kepada masyarakat.

Komposisi pagu anggaran Tahun Anggaran 2023 Dirjen Perhubungan Darat disusun berdasarkan kaidah-kaidah serta skala prioritas di mana komposisi belanja operasional sebesar Rp1,010 triliun dan belanja non-operasional sebesar Rp4,450 triliun. Jika, berdasarkan komposisi per jenis belanja, pagu anggaran sebesar Rp5,460 triliun terbagi menjadi:

a. Belanja pegawai sebesar Rp493,409 miliar atau 9,04%;
b. Belanja barang sebesar Rp2,992 triliun atau sebesar 54,80%;
c. Belanja modal sebesar Rp1,974 triliun atau sebesar 36,61%.

Selanjutnya, untuk penambahan anggaran sebesar Rp305,6 miliar diperuntukan kepada kegiatan layanan keperintisan angkutan jalan dan angkutan penyebrangan sebesar Rp137,8 miliar yang digunakan dalam

pemenuhan skala prioritas untuk daerah perbatasan dan terdepan, tertinggal dan terluar.

Dukungan pembangunan Ibu Kota Negara sebesar Rp9,4 miliar berupa dokumen perencanaan teknis dan penyediaan layanan bis antar moda serta pengadaan fasilitas keselamatan jalan sebesar Rp158,3 miliar guna pemenuhan skala prioritas kebutuhan perlengkapan jalan di 33 Provinsi.

Bapak Ketua, Wakil Ketua, dan Para Anggota Komisi V DPR RI yang terhormat,

Program penyelenggaraan transportasi darat terdiri dari dua program yaitu program infrastruktur konektivitas Dirjen Perhubungan Darat sebesar Rp4,615 triliun dengan rincian:

1. Infrastruktur konektivitas transportasi darat sebesar Rp1,986 triliun;
2. Pelayanan transportasi darat sebesar Rp1,002 triliun;
3. Keselamatan dan keamanan transportasi darat sebesar Rp1,054 triliun;
4. Penunjang teknis transportasi darat sebesar Rp572,051 miliar;
5. Sedangkan, untuk program dukungan manajemen adalah sebesar Rp845,232 miliar. Kegiatan program dukungan manajemen terdiri dari gaji tunjangan pegawai dan layanan perkantoran.

Secara singkat kami sampaikan rincian kegiatan per program sebagai berikut. Yang pertama, yaitu untuk kegiatan infrastruktur konetivitas transportasi darat terdiri dari kegiatan yang memiliki program dalam mendukung konektivitas baik dari segi penyediaan infrastruktur, sarana, serta pelayanannya dengan total anggaran sebesar Rp1,986 triliun. Beberapa kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut:

1. Pengadaan bus sedang sebanyak 186 unit;
2. Penyelenggaraan layanan keperintisan angkutan jalan, perkotaan PTS antar moda, keperintisan angkutan barang, keperintisan angkutan penyebrangan dan LDF selama satu tahun sebesar Rp1,329 triliun;
3. Pembangunan terminal tipe A lanjutan di Purworejo Jawa Tengah, Bimoku NTT, dan terminal barang internasional di Aruk Kalimantan Barat;
4. Pembangunan fasilitas pendukung integrasi moda di 3 lokasi KSPN;
5. Pembangunan pelabuhan penyebrangan baru di 3 lokasi;
6. Pembangunan pelabuhan penyebrangan lanjutan di 11 lokasi yang terdiri dari 7 lokasi selesai dan 4 lokasi lanjutan 2024;
7. Pembangunan pelabuhan sungai lanjutan di 6 lokasi;
8. Pembangunan pelabuhan danau lanjutan di 4 lokasi;
9. Pembangunan halte sungai di 5 Provinsi yaitu Jambi, Kalbar, Kalsel, Kalteng, dan Kalimantan Timur.

Kedua, program pelayanan transportasi darat terdiri dari beberapa kegiatan yang fokus dalam peningkatan pelayanan perhubungan darat sebesar Rp1,002 triliun dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pembangunan Arterial Transport Management System (ATMS) di jalan Pantura;
2. Pembangunan sistem angkutan umum massal. Ini bersumber dari PHLN di Medan dan Bandung;
3. Rehabilitasi peningkatan atau revitalisasi terminal penumpang tipe A yang terdiri dari 7 lokasi selesai dan 4 lokasi lanjutan 2024;
4. Pengadaan dan pemasangan perangkat *local port service* di danau Toba;
5. Pengembangan sistem layanan transportasi darat untuk menunjang layanan transportasi darat. Dalam hal ini pemeliharaan dan pembangunan sistem;
6. Operasional satuan pelayanan Dirjen Perhubungan Darat. Terdiri dari terminal A, terminal barang internasional, dan pelabuhan SDP di 435 satuan;
7. Rehabilitasi pelabuhan penyebrangan yang terdiri dari 9 lokasi selesai serta 5 lokasi lanjutan 2024;
8. Rehabilitasi pelabuhan sungai yang terdiri dari 5 lokasi selesai;
9. Dukungan *event* internasional seperti Sail Tidore, STQ dan Superbike;
10. Pendukung kegiatan hari raya keagamaan dan tahun baru Dirjen Perhubungan Darat.

Ketiga, program keselamatan dan keamanan transportasi darat terdiri beberapa kegiatan yang fokus dalam peningkatan keselamatan dan keamanan perhubungan darat, baik di transportasi jalan maupun di transportasi penyebrangan. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,054 triliun beberapa kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut:

1. Pengadaan dan pemasangan, pemeliharaan bantuan teknis perlengkapan jalan di 33 Provinsi serta penanganan lokasi rawan kecelakaan;
2. Pembangunan UPPKP di 4 lokasi selesai;
3. Rehabilitasi UPPKB di 5 lokasi selesai;
4. Operasional UPPKP di 124 lokasi;
5. Peningkatan keselamatan transportasi darat yang terdiri dari pengadaan alat uji kendaraan bermotor, Zos, pekan nasional keselamatan jalan dan pengadaan alat kalibrasi PKB;
6. Pengadaan fasilitas keselamatan di wilayah perairan ASDP yang terdiri dari pengadaan dan pemasangan rambu sungai serta pembangunan dan rehabilitasi sarana bantu navigasi pelayaran.

Selanjutnya yang keempat adalah program penunjang teknis transportasi darat dengan anggaran sebesar Rp572,051 miliar yang terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Blanko sertifikat uji tipe, blanko tilang, dan pencetakan buku lulus uji berkala;
2. Pendukung tupoksi Dirjen Perhubungan Darat yang di antaranya kegiatan adalah pemeliharaan peralatan lalu lintas, pendampingan manajemen proyek PTS angkutan perkotaan dan pemeliharaan fasilitas pengujian kendaraan bermotor di BPLJSKB Bekasi;

3. Tugas pokok dan fungsi Dirjen Perhubungan Darat yang diantara kegiatannya adalah monitoring, evaluasi, penegakan hukum dan sosialisasi;
4. Tunggakan untuk subsidi LDF Surabaya-Lembar.

Kemudian yang kelima adalah dukungan manajemen Dirjen Perhubungan Darat dengan total anggaran Rp845,232 miliar yang terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Gaji dan tunjangan pegawai;
2. Pembangunan gedung pelayanan;
3. Layanan perkantoran yang terdiri dari gaji PPNPN, belanja operasional kantor, pengadaan dan pemeliharaan peralatan mesin, serta pemeliharaan gedung bangunan.

Bapak Ketua, Wakil Ketua, serta Para Anggota Komisi V DPR RI yang terhormat,

Dalam rangka melaksanakan tema RKP Tahun 2023 yang tertuang dalam prioritas nasional kelima, yaitu memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Berikut adalah daftar kegiatan Tahun Anggaran 2023 yang diusulkan menjadi kegiatan prioritas nasional dengan total anggaran Rp2,827 triliun. Yang terdiri dari:

A. Infrastruktur konektivitas transportasi darat Rp1,736 triliun terdiri dari layanan angkutan transportasi darat, pembangunan terminal tipe A dan terminal barang internasional, dan pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyebrangan;
B. Pelayanan transportasi darat dengan anggaran Rp375,622 miliar yang terdiri dari pengadaan dan pemasangan ATMS, revitalisasi terminal tipe A dan rehabilitasi pelabuhan penyebrangan;
C. Keselamatan dan keamanan transportasi darat dengan anggaran Rp715,611 miliar yang terdiri dari pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan, pemeliharaan perlengkapan jalan, penanganan lokasi rawan kecelakaan dan pekan nasional keselamatan jalan di 33 Provinsi, pembangunan UPPKP dan rehabilitasi atau peningkatan UPPKB.

Pada kesempatan ini, kami turut menunaikan prioritas-prioritas dalam penyusunan program kerja Tahun Anggaran 2023 di mana program prioritas tersebut menjadi agenda utama dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat maupun pemenuhan target sebagaimana amanah RPJMN dan renstra. Adapun prioritas tersebut antara lain:

a. Dukungan 10 kawasan strategis pariwisata nasional di danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, Likupang, Tanjung Klayang, Bromo, Wakatobi, Morotai dan Raja Ampat sebesar Rp141,86 miliar;
b. Pengadaan 186 bus sebesar Rp102,30 miliar;
c. Dukungan Ibu Kota Negara, sebesar Rp15,87 miliar berupa penyusunan dokumen perencanaan untuk kegiatan konstruksi. Akan mulai dilaksanakan pada tahun 2024 setelah dibangunnya jalan

perkotaan kawasan inti pusat perkotaan serta penyediaan layanan angkutan antar moda;

d. Penyelesaian infrastruktur Dirjen Perhubungan Darat, pelabuhan sungai, danau, dan penyebrangan, terminal dan UPPKB ditargetkan penyelesaian di tahun 2023 dan dalam hal memerlukan perpanjangan waktu hanya dapat dilakukan maksimal Tahun 2024 Semester 1. Kegiatan yang belum selesai di tahun 2023 akan dilakukan analisa perhitungan *multiyears contract* sehingga dapat terselesaikan di tahun 2024. Untuk itu di tahun 2023 kami menyelesaikan kegiatan di 45 lokasi sebesar Rp539,16 miliar dan pembangunan infrastruktur baru dan berlanjut sampai selesai ke 2024, di 17 lokasi sebesar Rp345,52 miliar;
e. Dukungan BTS (*By The Service),* di 10 kota sebesar Rp589,87 miliar. Terdiri dari subsidi serta termasuk (*suara kurang jelas*) *management* dan pendampingan manajemen proyek dan implementasi angkutan masal perkotaan melalui dana PHLN sebesar Rp50 miliar;
f. Layanan keperintisan angkutan jalan, angkutan penyebrangan, layanan LDF, angkutan multi moda dan angkutan barang di 33 Provinsi sebesar Rp829,67 miliar. Untuk layanan keperintisan, angkutan penyebrangan sudah disebar ke masing-masing BPTD guna memudahkan pengawasan pelaksanaan;
g. Pembangunan fasilitas keselamatan jalan di 33 Provinsi sebesar Rp678,83 miliar. Yang terdiri dari pembangunan perlengkapan jalan sebesar Rp555,40 miliar, pemeliharaan perlengkapan jalan sebesar Rp32,19 miliar, penanganan rawan kecelakaan sebesar Rp42,678 miliar dan bantuan teknis perlengkapan jalan sebesar Rp48,550 miliar.

Dari kegiatan pembangunan infrastruktur yang dibangun Dirjen Perhubungan Darat terdapat beberapa kegiatan dengan sumber anggaran SBSN, sebanyak 25 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp512 miliar yang terdiri dari 10 kegiatan pembangunan atau rehabilitasi pelabuhan ASDP, 9 kegiatan revitalisasi terminal tipe A, dan 6 kegiatan pembangunan atau rehabilitasi UPPKB.

Selain itu, dapat kami sampaikan pula bahwa terdapat kegiatan dengan skema *creative financing* yaitu KPBU pembangunan *(suara kurang jelas)* di balai pengujian laik jalan dan sertifikasi kendaraan bermotor yang di Bekasi yang bertujuan meningkatkan kualitas kendaraan untuk keselamatan jalan, mengurangi emisi kendaraan, menyelaraskan persyaratan teknis produksi otomotif antar negara ASEAN serta meningkatkan ekspor melalui persetujuan jenis yang saling mengakui produk otomotif di Asean.

Bapak Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi V DPR RI yang terhormat,

Dalam rangka peran Dirjen Perhubungan Darat dalam pembinaan ke daerah dapat kami laporkan bahwa telah dilaksanakan DAK transportasi perairan. Untuk kriteria teknis dalam penyusunan DAK transportasi perairan antara lain adalah status aset dan pengelolaan pelabuhan milik Pemda. Hirarki

pelabuhan masuk dalam RIBN, kesiapan dokumen perencanaan, adanya kelembagaan pengelola di daerah dan kepedulian daerah dalam mengalokasikan APBD untuk sektor perhubungan.

Pada tahun 2022 telah dilaksanakan DAK untuk 28 lokasi penerima DAK dengan pagu alokasi sebesar Rp484 miliar yang terdiri dari 37 paket kegiatan rehabilitasi fasilitas pelabuhan dan 16 Unit pengadaan sarana Bis Air Roro. Selanjutnya, disampaikan bahwa untuk menyusun DAK transportasi perairan tahun 2023 saat ini sedang dalam sinkronisasi dan harmonisasi. Pada awalnya sesuai lokasi prioritas terdapat 16 Provinsi dan 60 Kabupaten/Kota. Namun berdasarkan hasil sinkronisasi dan harmonisasi, usulan yang memenuhi kriteria dan dapat ditindaklanjuti ke tahap penyusunan rencana kegiatan adalah sebanyak 3 Provinsi dan 22 Kabupaten/Kota dengan nilai sebesar Rp327 miliar.

Bapak Ketua, Wakil Ketua dan Para Anggota Komisi V DPR RI yang terhormat,

Kami menyadari usulan kegiatan Tahun Anggaran 2023 masih belum mampu memenuhi banyak kebutuhan masyarakat akan kehadiran pelayanan jasa transportasi darat. Namun dengan keterbatasan yang ada kami melakukan pemilihan kegiatan secara proporsional berdasarkan prioritas kebutuhan dan usulan yang memiliki kelengkapan persyaratan dokumen terhadap saran dan masukan Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR yang telah kami pelajari dan ditindaklanjuti. Namun demikian terdapat beberapa aspirasi yang belum dapat diakomodir dikarenakan dari hasil pendalaman *readiness criteria* yang dipersyaratkan masih belum terpenuhi seperti kesiapan lahan, kewenangan Pemerintah Daerah, ketersediaan dokumen perencanaan dan lainnya.

Demikian penjelasan secara umum yang dapat kami sampaikan tentang kegiatan dalam Pagu Anggaran Tahun 2023. Selanjutnya, kami mohon perkenan dukungan dan saran Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat guna penyempurnaan penyusunan rencana kerja dan anggaran APBN Tahun 2023 dalam rangka peningkatan pelayanan transportasi kepada masyarakat. Kami menerima saran dan masukan dalam upaya penyempurnaan RKA K/L 2023 di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, sekian terima kasih.

Wabillahitaufik walhidayah,
Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Dirjen Perhubungan Darat, Bapak Inspektur Jenderal Polisi Hendro Sugiatno. Ini kebetulan di rapat yang lalu kita belum perkenalkan secara resmi di Komisi, saya lupa raker saya yang pimpin. Terima kasih Pak Hendro, mungkin Bapak perlu berdiri kita mau kasih *applause* dulu ini, silakan berdiri, Pak Dirjen. Terlambat kita Pak, selamat bergabung Pak di Komisi V, Pak Hendro. Semoga dibawah Bapak Dirjen Perhubungan Darat tambah mantap tambah solid dengan Komisi V. Terima kasih, silakan duduk.

Dari paparan yang Bapak sampaikan sebelum saya ke Plt. Dirjen Perkeretaapian. Pak Sekjen, ini ada sesuatu yang menarik yang saya simak soal DAK, Pak. DAK ini kan ke Pemerintah Daerah ini ya kan*, nah,* mohon nanti juga DAK ini sasaran Pak, dikomunikasikan ke kita. Karena Pemerintah Daerah itu pasti kan bagian dari daerah pemilihan kami semua, Pak. Jangan sampai nanti daerah-daerah yang terima DAK padahal sumbernya APBN kita bahas di sini, pada saat pelaksanaanya ketika ditanya kalau biasanya bagus Pak, biasanya *nggak anu*, orang cuma yaudah terima kasih, bersyukur *alhamdulillah* puji Tuhan. Tapi kalau ada masalah biasanya kita ditanya, Pak, itu dari APBN loh Pak, itu bagaimana itu Komisi V melihatnya.

Nah, padahal kita *nggak* pernah dalami Pak soal DAK di sini. Pak Sekjen gini hari karena besok kita sudah final Pak, kita sudah raker. Mohon izin nanti untuk sasaran DAK ini Pak, di bagian catatan kita pada rapat hari ini tolong nanti di lokusnya dikomunikasikan kepada kami, Pak. Kemudian nanti mungkin pada saat penyerahan DAK ini ya, Komisi V dikasih muka lah, gitu loh Pak, kasih mukalah teman-teman Komisi V ini ya. Paling tidak ketika ada penyerahannya kepada Pemerintah Daerah ya kami diundang, ada kegiatannya kami diundang, itu saja, Pak. Kita hanya bisa bahwa kita turut membahas dan mempertanggungjawabkan itu sebelum itu dialokasikan kepada Pemerintah Daerah.

Demikian teman-teman ya, Komisi V yang terhormat. Ya karena ada beberapa WA ke saya terkait soal ini Pak, dari Anggota Komisi V nanti kami berharap ini tentu tepat sasaran. Kedua, juga ya ini dapilnya jelas teman-teman di sini, mudah-mudahan daerah pemilihan kami juga bagian dari kegiatan DAK ini. Kalau Pemerintah Daerahnya kurang memperhatikan sektor perhubungan karena itu menjadi salah satu kriteria tadi yang disampaikan oleh Pak Dirjen, sampaikan juga dengan kami, Pak. Mungkin kami bisa berdiskusi dengan para Kepala Daerah di tempat kami. Supaya di tahun-tahun berikutnya, daerah-daerah kita ini juga bisa menjadi sasaran penerima DAK. Sehingga mempercepat, atau mendorong atau memperbaiki kondisi transportasi di daerah kita masing-masing.

Demikian, selanjutnya saya persilakan Plt. Dirjen Perkeretaapian, Pak Zulmafendi. Silakan, Pak.

Plt. DIRJEN PERKERETAAPIAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI (ZULMAFENDI, S.E., M.Sc.):

Terima kasih, Pak.

Yang kami hormati Ketua Komisi V DPR RI,
Yang terhormat Wakil Ketua Komisi V DPR RI,
Yang terhormat segenap Anggota Komisi V DPR RI,
Bapak Sekjen dan Pak Dirjen Perhubungan Darat beserta seluruh jajaran,
Para Hadirin yang kami hormati.

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.
Shalom,
Om swastiastu,
Namo buddhaya, dan
Salam kebajikan,

Pada hari ini, yang berbahagia ini, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT. Karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat bertemu dalam acara Rapat Dengar Pendapat dengan Pimpinan dan segenap Anggota Komisi V DPR RI yang terhormat dalam Rangka Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2022 dan Pembahasan Alokasi Anggaran Menurut Fungsi Program dan Prioritas Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun Anggaran 2023.

Pimpinan dan segenap Anggota Komisi V DPR RI yang kami hormati,

Kami laporkan juga pada kesempatan RDP ini, dari Dirjen Perkeretaapian juga dihadiri oleh seluruh Direktur dan juga para Kepala Balai Teknik yang hadir secara *zoom*. Kami laporkan sebagaimana pendahuluan pendapat yang disampaikan terkait evaluasi pelaksanaan APBN Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September tahun 2022. Berdasarkan DIPA tahun 2022 pagu alokasi anggaran awal Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah sebesar Rp6,72 triliun. Di mana dalam pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022 terdapat beberapa perubahan atau pergeseran anggaran di antaranya luncuran anggaran SBSN untuk pembayaran kegiatan prioritas sebesar Rp179,2 miliar, pengurangan atau pergeseran untuk sub-sektor lain sebesar Rp5,29 miliar dan percepatan penarikan pinjaman luar negeri sebesar Rp43,8 miliar.

Kemudian, alokasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian tersebut terdapat *automatic adjustment* sebesar pendanaan rupiah murni tahap satu sebesar Rp155,94 dan tahap kedua sebesar Rp300,97 miliar dengan total keseluruhan *automatic adjustment* sebesar Rp456,9 miliar. Sehingga pagu akhir yang dapat digunakan Direktorat Jenderal Perkeretaapian menjadi Rp6,49 triliun. Dengan komposisi jenis belanja sebagaimana terlampir pada layar.

Selanjutnya, dapat kami sampaikan capaian realisasi penyerapan anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2022. Posisi pada tanggal 7 September 2022 adalah sebesar Rp3,05 triliun atau mencapai 47,01%. Adapun rincian Realisasi Anggaran Tahun 2022 berdasarkan jenis belanja meliputi:

- Belanja pegawai sebesar Rp83,57 miliar atau 73,34%;
- Belanja barang sebesar Rp633,6 miliar atau sebesar 39,90%; dan
- Belanja modal sebesar Rp2,33 triliun atau 48,75%.

Sedangkan berdasarkan sumber pembiayaan yang terdiri dari:

- Rupiah Murni sebesar Rp1,2 triliun atau 45,45%;

- Dana SBSN sebesar Rp1,8 triliun atau 48,88%;
- PHLN sebesar Rp34,36 miliar atau 29,1%; dan
- Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp3,65 miliar atau 17,54%.

Realisasi penyerapan tersebut memang masih di bawah prognosa penyerapan tahun 2022 dikarenakan ada beberapa hal. Yang pertama adalah adanya IMO yang ditugaskan kepada PT. KAI yang sampai saat ini belum dilakukan kontrak sebesar Rp500 miliar. Optimalisasi kegiatan SBSN tahun 2022 masih menunggu persetujuan revisi DIPA, rekomposisi, dan usulan kontrak tahun jamak. Di samping itu juga progres revisi DIPA untuk kegiatan pendukung SBSN yaitu untuk tanah perlintasan tidak sebidang antara Padalarang Bandung, pendukung operasional kereta api Makassar – Parepare dan kegiatan pendamping subsidi perintis lainnya, selanjutnya.

Pimpinan dan segenap Anggota Komisi V DPR RI yang kami hormati,

Kami sampaikan capaian *outcome* pembangunan perkeretaapian, kinerja keselamatan perkeretaapian diukur melalui indicator *red of accident*. Berdasarkan data periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 terus diupayakan penurunan angka tingkat kecelakaan kereta api dalam upaya mewujudkan *zero accident*. Posisi pada tahun 2017, angka tingkat kecelakaan mencapai 0,26. Dan, pada tahun 2022 triwulan kedua, nilai angka kecelakaan telah mengalami penurunan menjadi 0,18.

Kemudian, pada RPJMN dan Rencana Strategis Tahun 2020 sampai 2024, ditargetkan *track quality index* kategori 1 dan 2 sebesar 94%. Nilai TQI pada tahun 2019 sebesar 82% terus diupayakan peningkatan untuk mencapai target di mana sampai dengan triwulan kedua tahun 2022 telah diperoleh capaian sebesar 90%. Terhadap kinerja pelayanan angkutan kereta api dapat dilihat dan diukur melalui beberapa indikator di antaranya *on-time performance*. Yaitu, persentase realisasi jumlah tepat waktu keberangkatan dan kedatangan kereta api dibanding total keberangkatan dan kedatangan kereta api. Sebagaimana terlihat pada grafik bahwa *on-time performance* angkutan kereta api cenderung mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2019.

Selanjutnya, kami sampaikan juga terkait hasil pembangunan perkeretaapian tahun 2020 sampai tahun 2022. Program pembangunan perkeretaapian, pendukung konektivitas di antaranya berupa pembangunan jalur kereta api, baru menuju pusat kegiatan dan simpul transportasi lainnya dalam upaya mendukung integrasi antar moda, baik di wilayah Jawa, Sumatera dan Sulawesi. Selain daripada itu juga dilaksanakan kegiatan pembangunan lainnya, antara lain berupa peningkatan jalur kereta api, elektrifikasi jalur kereta api dan pembangunan modernisasi stasiun kereta api guna mendukung peningkatan pelayanan dan keselamatan perkeretaapian sesuai sasaran tahun 2020-2024.

Kemudian, terkait dengan pelaksanaan kegiatan padat karya bidang perkeretaapian. Sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan Nomor 70 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Padat Karya di

lingkungan Kementerian Perhubungan. Merupakan bagian dari lingkup kegiatan kontraktual, pembangunan dan peningkatan prasarana perkeretaapian. Terdapat rencana penyerapan tenaga kerja di sekitar untuk membantu pemulihan ekonomi nasional yang tersebar di 12 Provinsi, 68 Kabupaten dan Kota, atau 114 desa yang dilaksanakan oleh 9 balai atau satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Target penyerapan tenaga kerja padat karya sebesar 4.350 orang atau 381.898 orang hari dengan besaran upah Rp39,05 miliar. Telah terealisasi tenaga kerja padat karya yang terserap sebesar 2.589 orang atau 107.456 orang hari dengan besaran upah terserap sebesar Rp10,87 miliar atau 28%. Berikut, kami sampaikan sebaran kegiatan padat karya tahun 2022 yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Mohon berkenan bimbingan dan pengawasan dari Anggota Komisi V DPR RI, di lapangan.

Pimpinan dan segenap Anggota Komisi V DPR RI yang kami hormati,

Selanjutnya dapat kami sampaikan terkait Rencana Kerja Anggaran Tahun 2023. Berdasarkan dokumen rencana strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2020-2024. Target jalur panjang kereta api pada tahun 2024 sebesar 7.450 Kilometer *spoor* dan telah tercapai pada tahun 2021 sebesar 6.466 Kilometer *spoor*. Kemudian target kondisi jalur kereta api dengan kategori 1 dan 2 ditargetkan pada tahun 2024 mencapai 94% dan telah tercapai pada tahun 2021, sebesar 90,36%. Selanjutnya, target jumlah kuota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal menggunakan perkeretaapian berbasis rel seperti di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan dan Makassar ditargetkan pada tahun 2024 sebanyak 6 Kota dan capaian pada tahun 2021 sudah terbangun pada 5 Kota yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Semarang. Rasio kejadian kecelakaan kereta api per 1 juta kilometer tempuh pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 0,22 dan capaian pada tahun 2021 sebesar 0,23. Kemudian, target rata-rata *ontime performance* pada tahun 2024 sebesar 82% dan capaian pada tahun 2021 sebesar 91%.

Kemudian berdasarkan rencana kerja Pemerintah RKP Tahun 2023 dengan tema peningkatan produktivitas untuk transportasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dalam rangka pencapaian prioritas nasional terdapat tiga *major project* di bidang perkeretaapian yaitu kereta api Makassar–Parepare, dukungan perkeretaapian antara Padalarang dan Bandung untuk operasi kereta api *feeder*, serta sistem angkutan massal umum metropolitan atau SAUM baik itu di Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang dan Makassar. Untuk kegiatan yang dilakukan mendukung pada masing-masing *major project* sebagaimana terlampir pada layar.

Selanjutnya kami sampaikan kronologis perencanaan anggaran tahun 2023 sesuai dengan dokumen rencana strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2020-2024. Kebutuhan anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar Rp27,29 triliun. Dan, berdasarkan hasil koordinasi antar satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan

Pemerintah Daerah, operator perkeretaapian serta *stakeholder* terkait. Diperoleh indikasi pagu kebutuhan Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2023 sesuai tahapan, kesiapan pelaksanaan dan dipengaruhi *bottleneck* anggaran tahun sebelumnya diperoleh sebesar Rp15,35 triliun.

Kemudian, berdasarkan surat bersama Menteri PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan, perihal pagu indikatif serta surat Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, perihal penyampaian komposisi pagu indikatif tahun 2023 diperoleh pagu indikatif Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar Rp7,27 triliun. Sedangkan, untuk pagu anggaran 2023 adalah sebesar Rp7,27 triliun dengan rincian, berdasarkan jenis belanja meliputi belanja pegawai sebesar Rp110,27 miliar, belanja barang sebesar Rp1,876 triliun dan belanja modal sebesar Rp5,28 triliun. Sedangkan, berdasarkan sumber pembiayaan terdiri dari rupiah murni sebesar Rp2,56 triliun, BLU sebesar Rp24,69 miliar, SBSN sebesar Rp4,64 triliun, PLN sebesar Rp50,67 miliar.

Kemudian, dapat kami sampaikan bahwa terdapat perubahan pagu indikatif menjadi pagu anggaran sebesar minus (-) Rp4,39 miliar. Antara lain terdapat penambahan untuk mendukung IKN dan pengadaan penertiban lahan, serta terdapat penyesuaian pada beberapa kegiatan dengan sumber dana pinjaman atau hibah luar negeri. Dengan adanya penyesuaian alokasi di tahun 2023, baik SBSN maupun dana rupiah murni, Dirjen Perkeretaapian melakukan strategi relakasasi pelaksanaan kegiatan namun tetap dengan komitmen target penyelesaian di tahun 2024.

Pimpinan dan segenap Anggota Komisi V yang kami hormati,

Dapat kami sampaikan, postur anggaran tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja pegawai sebesar Rp110,27 miliar;
- Belanja barang sebesar Rp1,87 triliun, yang dengan rincian:
  - Belanja barang operasional mengikat sebesar Rp84,91 miliar;
  - Belanja barang dengan sumber dana BLU sebesar Rp23,34 miliar;
  - Belanja barang non-operasional sebesar Rp1,76 triliun.
- Sedangkan belanja modal sebesar Rp5,28 triliun dengan rincian:
  - Belanja modal dengan sumber dana rupiah murni sebesar Rp596,55 miliar dengan mengakomodir kegiatan skema *multiyears*, penyelesaian kegiatan dalam pekerjaan, kegiatan pendukung prioritas nasional, kegiatan perawatan prasarana, kegiatan mendukung konektivitas Padalarang-Bandung, serta pemenuhan *readiness criteria* dan pelaksanaan organisasi.
  - Belanja modal dengan sumber SBSN sebesar Rp4,64 triliun dengan mengakomodir kegiatan lanjutan tahun sebelumnya dan kegiatan prioritas yang baru.
  - Belanja modal dengan sumber dana PHLN sebesar Rp50,67 miliar;
  - Serta belanja modal dengan sumber dana BLU sebesar Rp1,35 miliar.

Selanjutnya, kami dapat sampaikan *highlight* prioritas kegiatan tahun 2023 terdiri dari kegiatan pembangunan prasarana perkeretaapian antara lain:

- Pada lintas Makassar-Parepare;
- Jalur ganda Solo Balapan-Kalioso;
- Jalur ganda Bogor-Sukabumi;
- Jalur Medan-Binjai;
- Jalur ganda Kiaracondong-Cicalengka;
- Jalur ganda Mojokerto-Sepanjang;
- Krueng Geukueh-Paloh;
- Reaktivasi menuju pelabuhan Tanjung Mas;
- Kewajiban AP Makassar-Parepare;
- Pembangunan fasilitas perawatan pengujian kereta api; serta
- Pengadaan material rel dan wesel R54.

Kegiatan perintisan kereta api di 6 lintas layanan antara lain:

- Pada lintas Krueng Geukueh-Kutablang;
- Tebing Tinggi-Kuala Tanjung;
- Lubuk Alung-Kayu Tanam;
- Bandara Internasional Minangkabau; serta
- LRT Sumatera Selatan.

Kegiatan peningkatan kapasitas prasarana dan keselamatan perkeretaapian terdiri dari peningkatan jalur kereta api antara lain:

- Pada segmen Medan-Belawan;
- Kisaran Mambang Muda;
- Padang Pariaman;
- Padang Bukit Putus Paulima;
- Solo-Wonogiri;
- Lempuyangan-Cianjur;
- Lempengan-Cianjur;
- Jember-Kalisat;
- Kertasemaya-Arjiwinangun;
- Maos
- Cilacap; dan
- Pada Commuterline Kemayoran-Tanjung Priok.

Pembangunan fasilitas perkeretaapian di antaranya pada stasiun Padalarang, Bandung, Kedongbangkong, Andir, Ciroyom, Cimindi, Rangkasbitung, pada lintas Manggarai-Jatinegara, serta pekerjaan utilitas pada bandar tinggi Kuala Tanjung.

Peningkatan fasilitas operasi perkeretaapian pada lintas Jatinegara-Bogor dan Manggarai-Kota, Prupuk-Purwokerto, Tegal-Pekalongan, dan sistem elektrifikasi perkeretaapian di Jabodetabek.

Kemudian, kegiatan prioritas lainnya yang terdiri dari peningkatan infrastruktur *maintenance* dan *operation*, kegiatan penanganan perlintasan

sebidang dan penanganan daerah rawan dan jembatan Prabumulih-Tarahan, serta sosialisasi keselamatan perkeretaapian.

Penyiapan *readiness criteria* antara lain; untuk penyiapan dokumen perencanaan pendukung IKN, kereta api perkotaan di Jabodetabek dan Surabaya, serta *mandatory* penertiban lahan jalur reaktivasi Rangkasbitung-Pelabuhan.

Pimpinan dan segenap Anggota Komisi V DPR RI yang kami hormati,

Selanjutnya, kami menyampaikan indikasi kegiatan padat karya pada tahun 2023 yang akan dilaksanakan pada 9 balai atau satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang direncanakan melibatkan tenaga kerja sebanyak 2.716 orang atau sebanyak 299,094 orang hari yang diperkirakan akan menyerap upah sebanyak Rp29,02 miliar. Diharapkan kegiatan ini ikut membantu program pemulihan ekonomi nasional terutama untuk rakyat menengah ke bawah yang berada di sekitar lokasi pekerjaan pembangunan perkeretaapian.

Kemudian, kami sampaikan indikasi kegiatan pendukung keselamatan perkeretaapian di tahun 2023, di mana kegiatan penanganan perlintasan yang meliputi pemasangan pintu perlintasan, pos jaga, dan perkerasan pintu perlintasan di 222 titik, pembangunan JPO di 7 titik dan kegiatan sosialisasi keselamatan perkeretaapian yang akan kami laksanakan pada tahun 2023 pada 8 Provinsi. Kegiatan tersebut mayoritas merupakan ruang lingkup kegiatan pembangunan dan peningkatan.

Pimpinan dan segenap Anggota Komisi V yang kami hormati,

Mengingat keterbatasan anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian, maka arah pembangunan tahun 2023 akan difokuskan lebih kepada penyelesaian dan pengoperasian jalur yang sudah dibangun serta memelihara jalur-jalur tersebut untuk menunjang keselamatan perjalanan kereta api.

Demikian, secara umum kami sampaikan terkait evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2022 dan program rencana kerja tahun 2023 Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Selanjutnya kami mohon perkenan dukungan, saran dan masukan segenap Anggota Komisi V DPR RI yang terhormat guna mewujudkan penyediaan pelayanan transportasi massal kereta api yang efektif, efisien, terjangkau bagi masyarakat dan mampu menjawab tantangan kedepan. Sekian dan terima kasih.

Wabillahitaufik walhidayah,
Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Makasih, Pak, Pelaksana Tugas Dirjen Perkeretaapian, Zulmafendi.

Bapak-Ibu sekalian,

Demikian penyampaian dari Sekjen, Dirjen Perhubungan Darat, dan Plt Dirjen Perkeretaapian. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke pendalaman. Di meja Pimpinan sudah terdaftar sebanyak kurang lebih 20 Anggota, ini rapat bakalan panjang. Saya memberi saran dan pendapat, kalau memang, kan kita RKA K/L…fokusnya RKA K/L 2023. *Nah*, kalau memang teman-teman sudah menyampaikan dan usulannya memang sudah mendapat perhatian dari Kementerian, menurut saya kita *nggak* perlu panjang-panjang *gitu loh*. Karena minggu depan kita *full* rapat untuk pengawasan *gitu loh, nah,* pengawasannya nanti saja jadi mutarnya tuh jangan mutar lagu lama terus, yang dengar juga bosan, putar lagu baru. *Nah*, putar lagu barunya nanti di pengawasan, hari ini kita fokus ke soal APBN dulu tahun 2023.

Jadi, supaya nanti tidak panjang-panjang. Saya berharap pertanyaan, saran, pendapat adalah terkait dengan APBN 2023. Nanti saya rasa teman-teman sudah pegang ini jadwal kita, Bu, ya*, nah,* saya yakin jadwal juga teman-teman sudah terima semua, soalnya minggu depan itu *full* untuk pengawasan termasuk Dirjen Perhubungan Darat, Sekjen dan Dirjen Perkeretaapian.

Saya persilakan untuk yang pertama Pak Irwan, sesuai daftar. Bersiap-siap Ibu Sadarestuwati.

F – P. DEMOKRAT (Dr. H. IRWAN, S.IP., M.P.):

Terima kasih, Pimpinan.

Yang saya hormati Pimpinan serta rekan-rekan Anggota Komisi V yang saya banggakan,
Yang saya hormati Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Republik Indonesia,
Yang saya hormati Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perkeretaapian, Para Direktur, Kepala Biro Perencanaan,
Serta seluruh Pejabat Kementerian Perhubungan yang hadir pada sore hari ini,

Pimpinan, perlu kami sampaikan apresiasi kepada Kementerian Perhubungan melalui Sekretaris Jenderal yang membersamai pembangunan ditanah air dan khususnya di Kalimantan Timur. Dan, saya lihat teman-teman pada gembira hari ini dan saya pikir layaklah hari ini menjadi hari apresiasi gitu ya terutama kepada Sekjen, Pak Dirjen Perhubungan Darat, dan Dirjen Perkeretaapian yang sudah menyampaikan, apresiasi.

Ya, jadi pertama untuk Pak Sekjen. Bahwa tadi disampaikan per Agustus-September ini, telah melewati target daripada PNBP ya, dan lebih tinggi dari pada tahun lalu. Tentu ini sebuah apa namanya, prestasi yang kami apa namanya, apresiasi. Dan, tentu kami dorong terus Kementerian Perhubungan meningkatkan PNBP, apalagi sampai hari ini memang negara kita butuh ya.

Kemudian untuk Dirjen Perhubungan Darat. Pimpinan, ini perlu kita apresiasi nih materi yang disampaikan oleh Dirjen Perhubungan Darat ini sangat informatif dan aspiratif. Saya pikir untuk di Kementerian PUPR, Kementerian bisa juga mencontoh apa yang dipaparkan. Dan, sehingga kita dalam mengikuti rapat itu juga bisa mengetahui ya sesuai dengan agenda kita. Dan, tentu kami sangat mengapresiasi paparan yang sudah dibuat oleh Dirjen Perhubungan Darat, terima kasih Pak Dirjen.

Kemudian terkait, kami hanya mengingatkan terkait rencana kenaikan tarif di sektor Perhubungan Darat. Bahwa betul-betul dipertimbangkan, jangan hanya dari sisi apa namanya, operator transportasi ya. Tetapi, juga dipertimbangkan dari dampak kenaikan BBM terhadap masyarakat pengguna transportasinya. Jadi harus seimbang, sehingga ada keadilan dan ada kemudian keberlanjutan. Apa gunanya kita naikan tarif tapi kemudian *demand* nya malah *nggak* ada, kasihan juga mereka.

Kemudian untuk Dirjen Perkeretaapian, terima kasih. Rencana kereta api *insyaallah* juga di Kalimantan ada sampai 2024. Kemudian ada aspirasi ya dari masyarakat di desa Silebu, Kecamatan Kerajilan, Kabupaten Serang Banten. Dulu ada kejadian kereta api nabrak odong-odong, 9 penumpang odong-odongnya meninggal di tanggal 26 Juni tahun 2022. Saya berharap di tahun depan sudah dibangun palang pintu perlintasan kereta api di situ, Pak. Ya kalau sampai berulang lagi kejadian karena tidak ada palang pintu, itu dosa kita semua di sini Pak, sama sekalian pos petugas penjagaannya.

Saya itu saja, Pimpinan, saya pikir tetap saya mengapresiasi hari ini apa yang telah disampaikan oleh dari Sekretariat Jenderal, kemudian Direktorat Perhubungan Darat dan juga Direktorat Jenderal Perkeretaapian, terima kasih.

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Makasih Pak Irwan. Pak Sekjen memang soal perlintasan sebidang ini harus kita mendapat perhatian serius, Pak. Kita ini, kan saya lihat untuk kereta api ini kan cenderung kita *multiyears contract* untuk yang pembukaan jalur baru. Sementara perbaikan terhadap eksisting ini terutama terkait dengan lintas sebidang ini progresnya harus jelas, Pak. Dan, saya belum melihat kemajuan yang signifikan, penanganan perlintasan sebidang. Karena memang sih, Pak Sekjen ya, ini kan bukan domainnya perhubungan semata, ini ada juga aspek Pemerintah Daerah di sini. Namun demikian inisiatif ya harus dari Dirjen Perkeretaapian *gitu loh,* dari Kementerian Perhubungan untuk mengkonsolidasikan dengan Pemerintah Daerah selaku pemilik wilayah. Kan ada arealnya kereta api, ada arealnya Pemerintah Pemda*, nah,* ini dikomunikasikan dengan baik.

Jadi, saya berharap ini kita sering kali ditanya Pak, ini kan kejadian kan yang berulang-ulang. Sudah berulang-ulang cenderung hampir kita *nggak*

ketemu solusinya *gitu,* Pak. Sudah punya tempat, di tempat yang sama terjadi lebih dari satu kali, Pak. Sebenarnya, Pak, ya kalau di satu tempat itu lebih terjadi dari satu kali itu sebetulnya kita termasuk kategori gagal menangani permasalahan ini. Dan belum ketemu solusi, solusinya kan harus diatasi, bagaimana aman supaya walaupun ada lintas sebidang tapi aman *gitu loh. Nah*, amannya ini yang kita sepertinya tidak menemukan solusi, saya mendalami sedikit soal itu. Saya berharap di anggaran ini juga memperhatikan soal penyelesaian masalah lintas sebidang. Ibu Sadarestuwati, bersiap-siap Pak Eddy Santana.

F – PDIP (Hj. SADARESTUWATI, S.P., M.MA.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi V yang saya hormati,
Pak Sekjen,
Pak Dirjen Perhubungan Darat, juga
Bapak Plt. Dirjen Perhubungan Laut beserta jajaran,

Eh *sorry*, kereta api. Sudah tua *nih*. Sudah tua. Sudah cucu.

Saya, pertama saya sampaikan terima kasih. Ternyata usulan saya untuk aspirasi saya untuk daerah pemilihan ternyata diakomodir juga, saya terima kasih banyak. Namun saya ingin bertanya ke Bapak Plt. Dirjen Perkeretaapian. Berkaitan dengan pembangunan jalur ganda kereta api Mojokerto-Sepanjang. Kemudian juga peningkatan jalur kereta api, fasilitas pendukung dan keselamatan Jember Kalisat. Saya ingin mendapatkan, apa, informasi, ini semuanya sudah dalam apa, proses pelelangan, artinya tinggal pengerjaannya saja ataukah belum. Karena beberapa kali pada waktu Pak Dirjen yang lama, ketika saya menanyakan untuk dapil saya selalu dikatakan itu sudah, Bu, itu sudah*, nah,* ini saya ingin menanyakan untuk yang itu.

Kemudian, untuk Bapak Dirjen Perhubungan Darat. Terima kasih sekali lagi dan saya hanya ingin menyampaikan titipan untuk permohonan kapal penyebrangan yang untuk sungai Brantas. Itu saja dari saya, terima kasih.

Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

F-P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Baik, lanjut Pak Dewo *nggak* ada ya? Oh ya, silakan Bu, ya. Boleh-boleh yang mau serahkan silakan, yang mau diserahkan *ayo*….

F – P. GERINDRA (Ir. EDDY SANTANA PUTRA, M.T.):

Ya, silakan.

F-P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Masih ada lagi? Bu Cen dari tadi Bu Cen. Ya, Pak Dewo sudah ya gantian sama Pak Eddy. Pak Dewo sudah *clear*.

F – P. GERINDRA (Ir. EDDY SANTANA PUTRA, M.T.):

Tadi saya sudah disebut ya, Pak Dewo? saya dulu ya.

F-P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Yang sudah hantar *nggak* usah *ngomong*, iya.

F – P. GERINDRA (Ir. EDDY SANTANA PUTRA, M.T.):

Iya.

F-P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Oke, silakan Pak Eddy.

F – P. GERINDRA (Ir. EDDY SANTANA PUTRA, M.T.):

Ya terima kasih.

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,

Pimpinan Komisi V beserta seluruh Anggota yang saya hormati dan saya banggakan,
Sekjen Kementerian Perhubungan,
Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, dan
Plt Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan beserta seluruh jajaran,

Saya ada beberapa hal yang ingin disampaikan, Pak, pertama, untuk Dirjen Perhubungan Darat ya. Di dermaga penyebrangan Tanjung Api-Api itu*, nah,* sekarang kan semakin semakin ramai itu, Pak. Ramainya begini, truk-truk yang tadinya langsung menyebrang dari Jawa gitu dari Jakarta atau dari Priok ke pulau Bangka. *Nah*, ini cenderung sekarang karena jalan tolnya sudah jadi, Bakauheni-Palembang cenderung lewat situ, kenapa? Karena ada selisih saty juta, Pak, mereka. Jadi, supir itu bisa bawa sastu juta, *gitu*, kalau lewat Tanjung Api-Api. *Nah*, ini kan bagus juga membantu mereka gitu. Hanya kondisi dari dermaga Tanjung Api-Api ini juga kurang harusnya ada perbaikan-perbaikan atau tambahan-tambahan *moveable bridge* nya gitu ya dan lain sebagainya kuranglah itu. Jadi, Ferry harus antrian gitu, sudah 12 atau 14 sekarang Pak, Ferry. Tadinya 1-2 gitu ya.

Nah, jadi arahnya itu Tanjung Api-Api mentok, jalan dari Palembang-Tanjung Api-Api itu sekarang bagus cukup bagus, jadi lancarlah itu. Makanya

hal-hal seperti itu jadi percepatan untuk nyebrangnya *gimana gitu* ya ini harus kita pikirkan supaya lebih cepat lebih bagus. Dan, juga mungkin ada di kolam pelabuhannya ada pendangkalan di situ, ada sedimentasi yang tinggi.

Nah, bangunan terminalnya ini milik Pemerintah Provinsi*, nah,* inilah yang menjadi masalah. Sudah sudah, sudah kumuh, kumuh sekali, jadi *nggak* nyamanlah. *Nah*, ini mungkin harus dibicarakan ya dibicarakan antara Kementerian Perhubungan dengan Provinsi, lebih baik Provinsi menyerahkan saja *gitu* ke Kementerian Perhubungan dan itu bisa dibangun. Ini yang saya tanya begitu jadi gak selesai-selesai, ya ini belum diserahkan mau dibangun tapi belum diserahkan. Jadi, ini sebetulnya bisa ya, kepentingannya ini ya harusnya bisa kita lakukan kalau ada…ada apa, salah satu dari Kementerian ataupun Pemerintah Daerah yang atau ada pertemuanlah, pertemuan satu meja antara dua ini saya kira bisa beres.

Nah, kemudian GT-nya itu panjang Pak itu panjang. Sehingga saya lihat perlu kalau orang-orang tua gitu ya Ibu-Ibu perlu ada bus gitu ada *shuttle* bus ya dari terminalnya itu ke kapalnya ke Ferry nya ke *bridge* nya gitu. *Nah*, ini…ini perlu diperhatikan, Pak.

Nah, kemudian kami juga menginginkan diteruskannya dermaga 16 Hilir itu 16 Hilir dan Sebrang Hulu. Itu di samping manfaatnya besar untuk kapal-kapal dari *(suara kurang jelas)* jadi kalau kami *nyebut situ (suara kurang jelas)* tongkang *gitu* yang dia belanjanya di 16 Hilir sekali belanja Rp200 Juta itu, besar itu bisa 60 sampai 80 ton, satu tongkang itu satu *(suara kurang jelas)* itu, kalau dibandingkan dengan truk kan lebih besar itu gitu. *Nah*, dibangun lagi diperpanjang 16 Hilir, jadi di kiri-kanannya Ampera. Termasuk juga hal yang sama di jembatan Musi II, kalau itu dibangun dermaga itu juga sangat bagus dan ini mempercantik Kota Palembang itu.

Untuk Dirjen Perkeretaapian sama Pak, ini, jadi lintasan sebidang itu jadi masalah di Sumatera Selatan. Kalau di kami itu justru angkutan batubara yang panjang gandengannya itu gerbong itu bisa satu kilometer gitu. *Nah*, ini kan jadi kalau nunggunya kalau itu lintasan tidak diperbaiki. *Nah*, ini baru satu-satu, setahun satu lintasan sebidang, kapan selesainya itu? harus ada terobosan lah. *Nah*, mungkin ada pembicaraan juga dengan PUPR bagaimana ini selanjutnya. Ada satu yang pernah saya sampaikan belum selesai juga Pak, yang di Lahat yang terendam air. Jadi ada ada apa, *underpass* ya, lintasan sebidang *underpass* dibangun oleh kereta api ini*, nah,* Direktorat Jenderal Kereta Api, tapi sampai sekarang *nggak* bisa dipakai karena terendam air. *Nah*, sekarang saya tunggu, kalau Pemerintah Kabupaten *nunggu*, *nggak* mau dia diserahkan, karena itu belum selesai, belum baik *gitu* masih terendam. *Nah*, itu saja Pak mungkin yang ingin saya sampaikan, terima kasih.

Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

F-P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Wa'alaikumsalam.

Iya saya ingatkan kita semua agar kita lebih fokus lagi, yang sudah disampaikan jangan kita ulang lagi dan kita masuk ke anggaran 2023. Jadi kita tidak lagi pengawasan, banyak pengawasan itu nanti, nanti kita ada setelah kita selesaikan apa anggaran 2023 nanti kita jadwalkan untuk pengawasan. Jadi, ya Pak Dewo, jadi Pak Dewo sudah langsung fokus ya, 2023, agar waktunya kita lebih cepat, saya kira sudah *clear* ya. Silakan, Pak Dewo.

F – P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):

Terima kasih, Pimpinan. Mengawali pembicaraan yang ingin saya sampaikan. Saya tentu fokus dengan Tahun Anggaran 2023, bahwa anggaran 2023 bagi *saya* clear tidak ada masalah. Saya setuju, saya cocok, saya mendukung. Karena *clear* saya akan berbicara lain, bukan berbicara soal anggaran lagi.

Saya ingin mengingatkan kepada Pemerintah khususnya Dirjen Perhubungan Darat. Dengan kebijakan kenaikan BBM tentu ada kebijakan lain yang harus dilakukan yaitu menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan. Yaitu masalah tarif angkutan umum baik itu barang maupun penumpang. Jadi, konskuensi dari kenaikan BBM tentu ada satu konsekuensi biaya operasionalnya menjadi tinggi, karena komponen utama biaya operasional itu adalah bahan bakar. Kalau bahan bakar naik menjadi sekitar 32% itu dihitung oleh Kementerian Perhubungan, kenaikan tarif angkutan, ekuivalen menjadi berapa persen, baik itu angkutan umum penumpang maupun barang. Saya minta Kementerian Perhubungan segera memutuskan hal ini.

Saya setuju dengan Pimpinan, bahwa ini lebih baik dibahas dalam rapat dalam konteks pengawasan. Tapi, tentu ini lebih cepat akan lebih baik, karena terkait dengan hajat hidup orang banyak, sehingga keputusan dari Menteri Perhubungan itu harus segera diterbitkan. Jangan sampai kenaikan tarif angkutan itu justru menjadi liar, mohon maaf saya katakan seperti itu. Atau dia melakukan satu kenaikan di luar dari batas kewajaran, efek daripada itu sangat besar, sangat besar. Karena *cost* logistiknya menjadi naik, harga setiap komoditi menjadi tinggi dan daya beli masyarakat menjadi menurun. Kalau itu terjadi di setiap jenis barang dan terjadi dalam kurun waktu yang lama, itulah yang namanya terjadinya inflasi. Kita tidak menghendaki terjadinya inflasi, maka saya minta Menteri Perhubungan segera membuat satu kebijakan untuk penyesuaian tarif ini. Melakukan suatu *exercise*, melakukan suatu simulasi dalam batas yang wajar, jangan sampai dengan kenaikan BBM ini akan menimbulkan persoalan baru. Saya minta Kementerian Perhubungan betul-betul cermat.

Serta juga terhadap kebijakan Pemerintah dalam hal ini Pertamina yaitu pemakaian BBM. Ya meskipun ini belum berjalan, tetapi saya berharap supaya tidak berjalan, yaitu tentang penggunaan APBN dengan sistem aplikasi. Sistem aplikasi ini tidak sesuai dengan kondisi *real* di lapangan. Sebelum Pertamina memutuskan atau sebelum Kementerian ESDM memutuskan. Saya berharap dari Kementerian Perhubungan memberikan satu masukan atau mengeluarkan

sebuah rekomendasi bahwa sistem aplikasi ini tidak tepat, tidak tepat. Agar menjadi bahan pertimbangan Kementerian ESDM atau Pertamina, hal yang direncanakan itu tidak dijalankan atau ditanggalkan. Ya saya sebenarnya ingin banyak menyampaikan kepada Pemerintah.

Terus yang ketiga lagi tolong ini masukan kepada Pak Dirjen Perhubungan Darat. Pak Dirjen sudah puluhan tahun pakai seragam coklat, saya melihat dari TV dari media *online* kelihatan gagah sekali dengan seragam coklat. Saya pikir menjadi Dirjen Perhubungan Darat, Pegawai Negeri Sipil kegagahannya menjadi berkurang, ternyata malah tambah gagah lagi gitu kan. Ini kayanya merupakan satu sinyal, ada satu pencerahan atau kecerahan di Kementerian Perhubugan di Direktorat Perhubungan Darat yang di bawah kepemipinannya Pak Hendro, terutama menangani masalah keselamatan, kecelakaan dengan fatalitas tinggi. Saya minta Perhubungan Darat hitung betul coba dengan data, kecelakaan dalam kurun waktu 2022 ini yang kategori kecelakaan fatalitas tinggi itu menaik atau tidak gitu ya jika dibandingkan tahun yang lalu. Menurut hemat saya secara awam yang tidak berbasiskan data dengan mengikuti berita setiap hari, seringnya terjadi kecelakaan fatalitas tinggi, tampaknya itu grafiknya naik.

Nah, kalau naik perlu ada satu evaluasi mengapa di tahun 2021 lebih rendah, 2022 naik, ini berarti ada sesuatu. Dan yang sering mengalami kecelakaan fatalitas tinggi itu justru angkutan umum dan angkutan barang. Biasanya didominasi oleh sepeda motor, tapi ini angkutan umum dan angkutan barang yang manajemen pengaturannya itu relatif lebih mudah dilakukan oleh Pemerintah. Kalau relatif lebih mudah dilakukan oleh Pemerintah, tapi mengapa hal seperti ini terjadi. Jadi, identifikasi pokok persoalan terjadi kecelakaan fatalitas tinggi, tolong itu dicermati oleh. Ada ODOL, ada masalah yang lain, yang lain tidak saya tambah, Pimpinan.

F-P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Oke.

F – P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):

Saya sudah diberi toleransi oleh Pimpinan berbicara di luar konteks anggaran. Saya berterima kasih, ya nanti akan saya tajamkan lagi ketika bertemu dengan Dirjen Perhubungan Darat pada konteks pengawasan.

F-P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Terima kasih.

F – P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):

Terima kasih,

Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

F-P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Baik lanjut Pak Willem. Pengawasan jangan ya, langsung di program ini. Silakan, siap-siap Pak Bob Andika.

F – P. DEMOKRAT (WILLEM WANDIK, S.Sos.):

Baik.

Pak Ketua, rekan-rekan Anggota Komisi V,
Pak Sekjen, Pak Perhubungan Darat dan juga Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perkeretaapian beserta seluruh jajarannya,

Pertama, untuk Pak Sekjen. Kami memberikan apresiasi atas capaian kinerja, dan selanjutnya terkait dengan Realisasi PNBP Tahun 2022 sudah melampaui 110%, lebih dari target yang telah ditentukan. Dan, kami juga mengharapkan terus melakukan upaya-upaya strategis agar PNBP 2022 dapat melebihi capaian PNBP 2021, demikian pun selanjutnya untuk PNBP 2023 karena tingginya penerimaan PNBP ini sangat bermanfaat di tengah-tengah negara sedang mengalami ketidakstabilan penerimaan negara dalam negeri dari rupiah murni, akibat dari berbagai krisis yang melanda di Nusantara maupun juga di dunia.

Dan, secara khusus pada kesempatan ini kami juga minta kepada Pak Sekjen untuk memperhatikan disposisi penempatan pegawai di wilayah kami di Papua. Untuk itu kami sangat mengharapkan agar Pak Sekjen mendukung putra-putri Papua, dalam berkarya di Kementerian Perhubungan baik di Perhubungan Darat, Laut maupun Udara.

Dan, kedua, kepada Saudara Dirjen Perhubungan Darat. Kami ucapkan selamat datang kepada Pak Dirjen dan pertemuan pertama ini kami juga menyampaikan selamat sekali lagi. Pak Dirjen Darat kami sangat mendukung program dan kegiatan 2022 dan 2023 yang lebih mengedepankan aspek keselamatan, keamanan, dan pelayanan prima di sektor perhubungan darat saat ini dihadapkan pada tingginya angka kecelakaan sebagaimana seperti yang telah disampaikan oleh pendahulu saya, Pak, sayap kanan kita sana. Oleh karena itu, Pak Dirjen Darat, mengenai fatalitas kecelakaan ini diperlukan inovasi dalam tata kelola program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan dari sisi kelembagaan, kemitraan dan finansial. Oleh karena itu, Komisi V DPR RI juga sedang menyusun RUU LLAJ.

Dan, Bapak Dirjen Darat yang kami banggakan,

Pada rapat ini kami mengucapkan terima kasih untuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Papua, baik di tahun 2022 maupun 2023 mendatang nanti. Tapi, pada kesempatan ini kami juga mengusulkan beberapa program yang kami harapkan supaya bisa dimasukan dalam program kerja nanti. Antara lain pemasangan lampu penerangan jalan umum di sejumlah

Kabupaten/Kota di Papua dan bus sekolah di Papua dan juga revitalisasi terminal. Dan, juga untuk lampu penerangan jalan kami harapkan ada perhatian dari Wamena sampai Tolikara sampai ke Puncak Jaya.

Pak Ketua, itu yang bisa dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, sekian. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Makasih Pak Willem, sudah, Pak? Iya makasih Pak Willem. Sekarang Pak Bob Andika. Dari Papua ke Sumut.

F – PDIP (BOB ANDIKA MAMANA SITEPU, S.H.):

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silakan, Pak Bob.

F – PDIP (BOB ANDIKA MAMANA SITEPU, S.H.):

Terima kasih, Pak Ketua.

Pimpinan yang saya hormati beserta seluruh jajaran Anggota Komisi V,
Yang saya hormati Pak Sekjen,
Pak Dirjen Perhubungan Darat, dan
Plt. Dirjen Kereta Api,

Saya langsung saja ke Pak Dirjen Perhubungan Darat. Pak, saya melihat ini tadi kan ada ini operasional pelabuhan penyebrangan di beberapa KSPN ini, Pak, di danau Toba ini, Pak. Ini kedepan ini mau di mana diarahkan ini Pak, yang dermaga-dermaga ini Pak, karena kalau *nggak* cepat ini ditangani, saya yakin dermaga ini akan ya pasti tidak terawat, Pak, hancur. Sia-sia kita bangun puluhan miliar kalau ini tidak Bapak arahkan ke mana, seperti yang dermaga-dermaga yang lain itu kan kita lihat Bapak serahkan ke ASDP. Ini mau diarahkan ke mana ini dermaga-dermaga yang KSPN ini Pak, ini tolong Pak, Bapak jelaskan. Karena saya lihat kalau *nggak* cepat diambil alih ini Pak, mau dikemanakan dermaga ini, ini baru bisa akan terjadi salah satu proyek yang tidak kita inginkan, Pak. Karena ini saya rasa ini kan Bapak hitung *demand* nya *nggak* ada ini, Pak, tidak memungkinkan ada *demand* nya. Jadi, ini *gimana* solusinya tolong nanti Bapak jelaskan Pak.

Selanjutnya ke Dirjen Perkeretaapian. Saya lihat Pak begitu banyak proyek-proyek peningkatan-peningkatan kereta api di Sumatera Utara Pak. Tapi kita menunggu nih Pak kapan peresmiannya? Kapan diaktifkan jalurnya? *Nah*, ini kita tunggu Pak, rencananya katanya tahun ini, tapi ini kita belum dengar juga kapan diaktifkan khususnya di Medan-Binjai *nih*, Pak.

Terus ke depan Pak, tolong juga nanti misalkan kita ini membangun saja bisa, Pak, tapi untuk menjaga keselamatan masyarakat *nggak* bisa kita jaga, Pak. Contohnya kita bangun jalurnya begitu bagus, panjang apa segala macam, pintu pengamanan palang kereta api itu saja pun banyak *nggak* terpasang, Pak. Kita proyek triliunan, tetapi untuk urusan pintu palang saja kita lalai. Mungkin itu saja sedikit Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Makasih, Pak Bob, Pak Tamanuri.

F – P. NASDEM (Drs. H. TAMANURI, M.M.):

Makasih, Pak.

KETUA RAPAT:

Siap-siap, Pak Sigit.

F – P. NASDEM (Drs. H. TAMANURI, M.M.):

Boleh saya langsung saja, Pak, ya? Pak Dirjen Perhubungan Darat. Saya terima kasih, Pak Dirjen Perhubungan Darat ada dua terminal yang sudah Bapak perhatikan, terminal Subin dengan terminal Jabasah, makasih.

Kemudian, ini Bapak menyampaikan tadi mengenai 10 objek pariwisata. Kalau memang Dirjen Perhubungan Darat sudah juga menangani masalah pariwisata, kenapa yang kecil-kecil diperhatikan juga Pak, yang kecil-kecil perhatikan juga untuk dikembangkan. Karena itu mendatangkan satu *income* untuk daerah atau untuk Kabupatennya.

Kemudian BTS, Pak, saya lihat dananya cukup besar Rp589 miliar, kenapa *nggak* dikurangi saja yang ini kita kurangi anggarannya untuk kita alokasikan ke tempat yang lain. Karena ini kan sudah *multiyears*, terus, 3-4 tahun ini.

Kemudian Bapak kereta api, Dirjen Perkeretaapian. Mohon dapat informasikan kepada kami kapan itu bisa dibikinkan dua jalur dari Kertapati sampai ke Bandar Lampung itu. Karena itu Babaranja itu semua kereta kalau Babaranja mau lewat, berhenti. Nah jadi kalau dia sudah dua jalur kan *nggak*-nggak menghalangi soal itu, saya rasa demikian.

Kemudian kalau KIR mobil masuk di mana nih? Dirjen Perhubungan Darat? KIR…KIR…KIR…KIR mobil. Ya bukan, maksud Bapak apa.

KETUA RAPAT:

Pak, Pak nanti, lewat sini Pak, lewat Pimpinan.

F – P. NASDEM (Drs. H. TAMANURI, M.M.):

Oh gitu.

KETUA RAPAT:

Nah, Pimpinan.

F – P. NASDEM (Drs. H. TAMANURI, M.M.):

Saya mau.

KETUA RAPAT:

Nanti bisa dijawab sekaligus.

F – P. NASDEM (Drs. H. TAMANURI, M.M.):

Oh gitu.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F – P. NASDEM (Drs. H. TAMANURI, M.M.):

Jadi ini saya rasa, Pak, KIR ini perlu, Pak. Di Lampung itu daerah-daerah yang baru tumbuh, dia *nggak* punya, ini tidak ada KIR-nya. Ini menentukan Pak, salah KIR kita, saya pernah baca di Jawa ini dari mana, di Tegal apa, dia ambil KIR-nya satu-satu Kabupaten yang lain, *tau-tau* dikeluarin, *tau-tau* akhirnya mobilnya tabrakan. *Nah*, ini jadi perlu setidak-tidaknya setiap kabupaten itu ada KIR ada kantor KIR-nya supaya bisa kita melihat kondisi mobil itu.

Kemudian, kita sama-sama dari Lampung kan, Pak Hendro, Bapak kan sering naik kapal terbang. Itu kalau Bapak turun malam-malam ke Bandar Lampung, gelap gulita kan, Pak? *Nah*, ini tolong, Pak, lampu jalannya. Sekian, terima kasih.

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Makasih, Pak Tamanuri. Selanjutnya, Pak Sigit, bersiap-siap Bu Cen.

F – PKS (Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO):

Terima kasih, Pak Ketua.

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,

Pak Sekjen, Pak Dirjen dan Pak Plt. Dirjen yang saya hormati, saya banggakan,
Teman-teman Anggota Komisi V yang tercinta,

Yang pertama, Pak Sekjen, ini saya buka presentasi Pak Sekjen halaman 8, target dan prognosa PNBP. Di situ *kok* Perhubungan Darat tidak ada ya datanya Pak, ya? Cuma untuk Dirjen-Dirjen yang lain ada PNBP-nya, iya hanya untuk Perhubungan Darat tidak ada datanya. Mungkin perlu dijelaskan, karena saya nyari di data Perhubungan Darat, yang disampaikan oleh Pak Dirjen Perhubungan Darat, kami juga tidak ketemu PNBP untuk tahun, target PNBP tahun 2023. Yang kami temui hanya target PNBP tahun 2022 yang targetnya terealisasi apa *nggak* ini, terealisasi ya?

Saya kira untuk Pak Sekjen itu saja, Pak Sekjen. Kami butuh karena minta bantuan juga Pak Sekjen karena kami melihat sepertinya di Direktorat Jenderal yang ada di kiri dan kanan Bapak itu anggarannya berkurang, anggarannya tidak sesuai dengan pagu kebutuhan, *wabil* khusus untuk Perhubungan Darat. Dari pagu kebutuhan Rp14 triliun ya, baru ada pagu indikatif Pak sebesar Rp5,1 triliun. Itu saja pagu indikatif ya, belum lagi nanti pagu anggaran. Jangan-jangan turun lagi, jangan-jangan di *focusing* lagi, *refocusing* lagi. Saya khawatir Pak Dirjen Perhubungan Darat yang tadi kata Pak Dewo gagah, nanti jadi tidak gagah nanti karena terus anggarannya di *refocusing*, saya kira minta bantuan itu.

Yang kedua, minta bantuan untuk kereta api, Pak, ingat saya tahun 2023 itu sudah sampai Surabaya. *Nah*, ini *nggak* ada ini barangnya, di sini hanya sampai Mojokerto-Sepanjang, Sepanjang sudah selesai, sudah dikerjakan Bu Estu, Sepanjang Bu Estu rupanya. *Dan*, saya sempat mendatangi dua kali kerja yang untuk masyarakat itu kerja untuk masyarakat itu padat karya itu saya sempat dua kali mendatangi. Cuma pertanyaan saya tahun 2023 ini *nggak* ada dari Sepanjang ke Surabaya, padahal sudah ada pembebasan tanah dan penggantian ganti untung kepada masyarakat di sekitar. Ini bahaya ini, kalau sudah begitu nanti, bisa ruwet lagi nanti, Pak. Saya kira itu dua untuk Pak Sekjen.

Untuk Pak Dirjen Perhubungan Darat, tadi saya mencari-cari target PNBP Pak Dirjen berapa ya, tahun 2023. Kenapa saya cari-cari Pak Dirjen? kenapa saya cari barang itu Pak Dirjen? Karena Perhubungan Darat tadi sudah disampaikan yang paling, yang paling iya, banyak memproduksi, bukan memproduksi ya *gimana* ya, yang paling banyak kecelakaan itu kan dari kegiatan-kegiatan yang ada di transportasi darat, tadi sudah disebut oleh beberapa teman.

Saya kira ada hubungannya itu antara PNBP dengan kecelakaan-kecelakaan yang banyak itu, rem blong kan. Kemudian apa lagi, berarti KIR-nya *nggak* benar itu atau uji apa itu kondisi kelaikan jalannya *nggak* benar itu ya. Jadi, uji kelaikan jalan dan kita sering dulu melakukan apa namanya, kunjungan ke terminal-terminal selalu kita temukan, uji kelaikan jalannya *nggak*

benar. Ada yang ininya apanya, *wipernya nggak* jalan, ada yang remnya diganjel dan seterusnya. Jadi, Pak Dirjen saya kira untuk 2023 cobalah kita membuat sejarah yang baru. Dulu kami punya saat lebaran itu kita punya target namanya *zero accident*, sekarang tidak ada lagi itu. Ketika kita bicara tentang liburan lebaran atau liburan tahun baru ya, *nggak* ada lagi *zero accident* itu, sudah waktunya dan saya kira bisa direncanakan sejak sekarang. Memang kami melihat persoalannya adalah pagu yang tidak memenuhi kebutuhan itu ya. Tapi, cobalah untuk dicari solusinya, salah satunya tentu lewat PNBP.

Perhubungan Darat, kemudian Perkeretaapian. Saya kira tadi itu satu saja, *kok nggak* ada itu sampai Surabaya Pak hilang. Jadi, maksud saya begini Pak, kalau kita sudah punya rencana ya kan tidak bisa tiba-tiba hilang begitu, ini kan RPJM lima tahun, ya kan 2024 kalau *nggak* salah sampai Surabaya. Terus tiba-tiba hilang tidak ada ceritanya itu bagaimana juga *gitu loh*, kita ini. Apalagi kerjaan-kerjaan seperti itu selalu *multiyears*. Jadi apa namanya, mohon ini dipresentasikan lagi bagaimana cerita untuk kelanjutan *sekuen* dari Sepanjang ke Surabaya.

Terakhir Pak Dirjen, 2023 ya. Para Dirjen sebelumnya itu Dirjen Darat, Dirjen Kereta Api itu adalah Dirjen-Dirjen yang paling komunikatif dengan kami Anggota Komisi V. Pak Dirjen Darat *gampang* banget waktu itu Pak Budi itu kita *telfon*, waktu itu Pak Dirjen Udara Pak Novie *gampang* banget enak banget, saya yakin sekarang juga masih enak ya.

Saya kira terakhir, kami harap agar para pengganti Dirjen-Dirjen yang lama itu juga senyaman kami berkomunikasi dengan Dirjen-Dirjen terdahulu. Kalau Pak Zulfirmandi ya, itu mungkin *nggak* terlalu bedalah dengan Pak Zulfikri ya karena sama-sama orang Padangnya. Saya yakin Pak Zul, Plt. Dirjen Perkeretaapian, saya yakin kita masih bisa baguslah. Tinggal Pak Dirjen Darat tentu kami sangat berharap agar komunikasi yang baik antar Anggota dengan Pak Dirjen bisa terlaksana dengan mantap, lebih mantap daripada Pak Dirjen terdahulu. Terima kasih saya pikir itu, Pak Ketua.

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Sigit, tugas kita dua Pak Sigit, menurunkan berat badan.

F – PKS (Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO):

Ada tiga sebetulnya, Pak, turunkan harga minyak, turunkan berat badan kan menurunkan.

KETUA RAPAT:

Kalau *gitu* saya batal nurunkan berat badan, Pak.

F – P. NASDEM (H. SYARIEF ABDULLAH ALKADRIE, S.H., M.H.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan, Pak Syarief.

F – P. NASDEM (H. SYARIEF ABDULLAH ALKADRIE, S.H., M.H.):

Nggak, saya ini cuman mungkin kita pertegas saja kalau memang dibuka juga untuk pengawasan ya kita pengawasan juga. Kalau cuma *nyaut* untuk 2023 ya mungkin harus kita ya 2023 juga mungkin.

KETUA RAPAT:

Cocok, ini saran dari Pimpinan Banggar ini. Kan ini kan ditunggu oleh Pimpinan Banggar setelah kita raker. Saran saya kita pengawasan kan minggu depan jadwalnya sudah jelas *nih* Pak, pengawasan betul. Jadi, kita kalau memang masih ada yang mau kita koreksi dari 2023 kita koreksi, tapi kalau *nggak* ya *nggak* usah *gitu loh*, kita *nggak* usah panjang-panjang. Supaya Bapak-Bapak ini kan mereka ini pulang karena besok kita raker *nih,* Pak, kenapa saya minta persingkat, harus kasih waktu juga untuk beliau-beliau ini kerja, menyesuaikan saran, masukan dan pendapat untuk raker besok, kan begitu, besok raker *loh* Pak. Ini Pak Sekjen ini nyiapin raker ini besok.

Nah, kalau memang itu sudah setuju sudah, kita sampai di situ saja gitu. Tapi kalau masih ada yang mau dikoreksi silakan, tadi Pak Sigit saya *nggak* berani Pak saya potong, jujur saja *nggak* berani saya. Tapi Pimpinan Banggar sudah menyampaikan, ya sudah saya mau kasih tahu juga besok kita raker APBN tahun 2023, ya. Kalau *nggak* ada tambahan besok sudah final Pak, kan gitu Pak Syarif, ya? Sepertinya tidak ada tambahan info yang saya terima sampai hari ini untuk Komisi V.

Nah, oleh karena besok beliau-beliau ini menyiapkan seluruh bahan untuk raker, termasuk juga kepentingan kita di Komisi ini. *Nah*, saya usul ini, setuju saya biar beliau-beliau ini kerjakan, kan semua sudah pada dorong map *nih* kita saran, pendapat, masukan, usulan dari dapil dan seterusnya kan masih dikerjakan ini Pak Jhonni, mensinkronkan angka-angka besok, Pak, ini kan nanti ada soal angka ini, ada berubah *nggak*, sinkron *nggak* dan seterusnya, ya kalau *nggak* sampai raker besok *nggak* selesai*, nah,* kan kita juga nanti yang uring-uringan.

Silakan-silakan yang bawa catatan saya persilakan sekarang kalau masih ada, silakan. *Nah*, Pak Sigit silakan, saya lihat ada yang dibuka-buka.

F – PKS (Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO):

Itu tadi, itu tadi yang PNBP tadi.

KETUA RAPAT:

Nggak iya, nanti dijawab Pak, nanti dijawab.

F – PKS (Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO):

Iya itu saja

KETUA RAPAT:

PNBP nanti dijawab.

F – PKS (Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO):

Saya mempertanyakan PNBP yang 2023.

KETUA RAPAT:

‘23, target ya? baik-baik. Saya rasa kalau masih ada yang lain? *Nah*.

F-PKS (DR. H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, Lc., M.A.):

Pimpinan.

F – P. GERINDRA (Hj. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M.):

Kasihlah dikit-dikit.

F-PKS (DR. H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, Lc., M.A.):

Satu poin saja.

KETUA RAPAT:

Satu poin, sana satu poin sudah habis itu sudahlah. Pengawasan minggu depan Pak, betul. Tapi kalau masih ada yang mau diusulkan.

F-PKS (DR. H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, Lc., M.A.):

Terkait.

KETUA RAPAT:

Sebentar, *nggak* maksud saya biar kita fokus. Kalau masih ada yang mau diusulkan tolong usulannya diantar. *Nah*, nanti kan dari usulan kita ini lokus, nilai dan seterusnya itu kan mesti disusun, Pak. Besok kita ada raker, *nggak* ada waktu ini. Silakan, Pak sedikit, sana sedikit, silakan.

F-PKS (DR. H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, Lc., M.A.):

Ya satu saja mungkin.

KETUA RAPAT:

Ya.

F-PKS (DR. H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, Lc., M.A.):

Karena salah satu program kita adalah keselamatan jalan lalu lintas. Saya minta Pak untuk program kita 2023 ada *zebracross* Pak, *zebracross* dan lampu apa namanya untuk jalan-jalan nasional yang apa namanya, pendidikan lembaga pendidikan yang ada dijalan nasional kita Pak, itu saja untuk keselamatan. Karena khusus di dapil dan barangkali di semua daerah ya ini paling rawan kecelakaan, anak-anak sekolah kita, SD dan seterusnya.

Dan terakhir kan ada kecelakaan di Bekasi itu. *Nah,* sehingga kalau ada semacam, apa namanya kalau kita lewat? *Grill* ya?

KETUA RAPAT:

Speed bumping.

F-PKS (DR. H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, Lc., M.A.):

Speed-nya bisa dikurangi *gitu*, ini saja, Ketua.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

F-PKS (DR. H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, Lc., M.A.):

Mudah-mudahan ada programnya lebih fokus di 2023.

KETUA RAPAT:

Baik, Pak. *Ndak* ini Bu Novi, habis itu Pak Soehartono. Bu Novi katanya mau sedikit tadi, silakan.

F – P. GERINDRA (Hj. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M.):

Iyalah saya kan *pengen ngomong* sedikit saja. Makasih Pimpinan dan semua Dirjen, Sekjen. Langsung saja Pak Sekjen, saya lihat ini kegiatan 2023 mengenai *monitoring* dan evaluasi terhadap kebijakan tarif *gitu*. Saya ingin tanya ini apa kegiatannya seperti apa, kemudian kebijakannya apa yang sudah dikeluarkan, itu pertanyaanya. Kemudian, ini diburu-buru jadi lupa semua.

Terus yang kedua tentang Dirjen Darat, Dirjen Darat ini dari asli Lampung Pak ya? *Nggak*, Kapoldanya Lampung tapi aslinya Cilacap gitu. Jadi, dapilnya sama sama saya, makanya program yang turun di Kabupaten Banyumas dan Cilacap saya berharap nanti bisa bersinergi. Jangan kemudian turun langsung.

Ya, jadi saya lihat tadi ada beberapa. Karena usulan lampu penerangan itu sama sekali belum turun, padahal Cilacap-Banyumas banyak banget daerah yang gelap *gitu*. Apalagi di Cilacap ini adalah Kabupaten terluas di Jawa Tengah dari 35 Kabupaten/Kota. Saya berharap di 2023 Pak Dirjen ini Pak Dirjennya baru, kemarin Dirjen dari Banyumas, sekarang Cilacap, harus mungkin saya berharap lebih baik lagi. Makanya nanti program-programnya saya minta bersinergi dengan kita.

Kemudian, *loh nah* ini. Kemudian Pak, minta tolong itu yang ODOL WIM di Dirjen Darat dan mungkin Pak Sekjen harus sangat dimonitor, Pak. Dan, untuk kereta api, terima kasih programnya ada di Kabupaten Cilacap. Saya juga berharap nanti pada saat beracara, kita sama-sama, ya, makasih.

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Pak Soehartono.

F – P. NASDEM (Drs. H. SOEHARTONO):

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Yang saya hormati Ketua dan Anggota Komisi V,
Yang saya hormati Para Dirjen,

Singkat, karena waktunya pendek, Pak, untuk kereta api, Pak. Saya sudah ini mulai tahun keempat saya mengusulkan stasiun kereta api di Madiun yang saat itu bersama-sama kita tinjau dengan kepala balai. Dan, waktu itu kepala balai sama pimpinan stasiun itu sudah bersepakat minta jalan di sebelahnya, kalau bisa dihibahkan ke kereta api, saya negosiatornya dan berhasil. Cuma kereta api kelihatannya sampai saat ini tidak rela menghibahkan sebagian asetnya kereta api. *Loh* kan lucu, Pak, kita ini sudah ngehibahkan jalan sepanjang itu, kita berikan sama kereta api, tapi kereta api sendiri yang asetnya cuma empat rumah saja *nggak* bisa Pak, sampai sekarang gantung, *saking* emosinya si Pak Wali, jalan itu sudah dibuat yang di situ, tapi berhenti sampai di situ dan tidak boleh dipakai. Tolong itu saya mohon perhatiannya, karena kita sudah sekali *ngukur* segala dengan kepala balai.

Kemudian yang jembatan sebidang Pak, nanti kita akan ada rapat dengan Pak Dirjen Bina Marga, Pak, kendala di Madiun itu jembatan sebidang. Itu Pak, untuk kereta api, kemudian untuk Dirjen Darat.

Terima kasih, stasiun terminal penumpangnya sudah jadi, Pak. Terus yang kedua saya ingin tanya Pak, PJU itu apa boleh dipasang di desa? Pengalaman saya, Pak, semenjak empat tahun yang lalu saya *ngusulkan* PJU PJU PJU. Itu di jalan Bina Marga, sampai sekarang tidak bertuan, artinya tidak ada pemeliharaan, iya saya yang lalu sudah ngomong ini juga, ini untuk monumen atau untuk apa. Jadi, *goodwill* nya bagus tapi *follow up* nya *nggak* jelas Pak, *nggak* dipelihara, padahal setiap PJU, itu PJU-nya sendiri kan murah itu, Pak, lampunya itu.

Nah, oleh karena itu saya mengusulkan, Pak, bisa dipasang di tingkat desa. Karena sekarang desa itu mandiri, sehingga mereka bisa apa memperbaiki sendiri *gitu*. Itu sekarang lampu PJU itu, Pak, di setiap toko lampu sudah jualan, sudah jualan Pak, kayak *mercury* begitu. Jadi, oleh karena itu saya mengusulkan PJU ini bebas saja yang penting dipasang di Republik Indonesia, terima kasih.

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Ya, asal jangan ditaro di tengah laut saja, Pak, nanti masuk lautan teduh dia. Pak Hamka, silakan.

F – P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS.):

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,

Pimpinan dan seluruh Anggota yang saya hormati,
Pak Sekjen, Pak Dirjen Perhubungan Darat, Plt. Dirjen Perkeretaapian dan seluruh jajaran yang hadir pada sore hari ini,

Hanya ada tiga poin, Pak Ketua, yang pertama saya ingin menyampaikan di ruangan ini. Terima kasih dan apresiasi khususnya di Badan Anggaran telah merealisasikan PNBP yang cukup bagus. Karena kebagusannya, Bapak ditargetkan dan terima kasih bersedia menambah PNBP tahun 2023 menjadi Rp8 triliun, terima kasih Pak. Ini kemarin minta titip salam semua teman-teman dari Badan Anggaran termasuk Pimpinan yang ada di samping saya, itu luar biasa Pak. Jadi, lembaga yang ketiga, tapi susahnya untuk harus berkoordinasi dengan Pak Sekjen karena tidak hadir pada waktu itu, terima kasih Pak Sekjen. Artinya apa? Semua jajaran yang ada di Kementerian Perhubungan, harus memaksimalkan upayanya untuk meningkatkan penerimaan PNBP tersebut, ini luar biasa. PNBP itu akan banyak masuk dan akan meningkat kalau pelayanannya itu baik dan fasilitas yang kita siapkan juga itu baik, ini yang saya sampaikan yang baik-baik dulu. Nanti yang tidak-tidak baik sedikit di belakang.

Yang kedua, saya terima kasih Pak Dirjen Darat telah memprogramkan tiga dermaga di daerah pemilihan saya. Ini terima kasih luar biasa karena sudah

dua Kepala Balai di sana Pak, baru kali ini teralisir, mulai dari Kepala Balainya Pak Benny, Kepala Balainya Pak Surya, sekarang Kepala Balai yang baru saya belum kenal, *insya Allah* saya akan mau ketemu dengan beliau. Tiga lokasi dermaga ini Pak itu berada di sekitar perbatasan Sumbawa. *Nah*, oleh karena itu saya sangat berterima kasih, karena saya kawal ini sudah hampir lima tahun. Mulai daripada penyusunan DED-nya, sampai pembebasan lahan dari Pemerintah Daerah saya kawal terus sampai selesai dan *alhamdulillah* sudah dianggarkan pada hari ini, walaupun MWC tidak ada masalah. Itu ucapan terima kasih saya dan perjuangan saya sudah hampir enam tahun *alhamdulillah* hari ini diprogramkan.

Yang selanjutnya, yang kurang-kurang barangkali harus kita pikirkan dengan baik kepada Pak Dirjen Perhubungan Darat. Saya memperhatikan subsidi mengenai BTS ini, Pak, saya bukan tidak setuju mengenai pelaksanaan BTS, saya sangat setuju mengenai itu tetapi ada catatannya. Saya ingin menyampaikan di sini bahwa tolong beri batas waktu terhadap subsidi Rp500 miliar yang Bapak anggarkan ini. Kalau setiap tahun tidak ada batas waktunya, itu juga barangkali kita harus berpikir baik-baik. Kenapa saya katakan demikian? Kita harus akui juga bahwa moda transportasi umum itu diperlukan setiap kota, tapi tentu harus ada batas waktu subsidi itu. Anggaran negara kita sekarang, Pak, dalam kondisi baik-baik saja, tetapi kita harus berpikir semaksimal mungkin untuk menghemat subsidi itu. Subsidi bahan bakar yang kita dengar, subsidi BBM dan seterusnya itu 600 sekian triliun untuk Oktober kata Menteri Keuangan.

Nah, oleh karena itu saya titipkan sekali lagi, ayo kita evaluasi secara cermat anggaran Rp500 juta ini apakah kena sasaran atau tidak, ya, Rp500 miliar, Rp500 miliar untuk BTS, *management* yang lain hanya Rp500 miliar. Saya mohon ada terobosan-terobosan baru dan ini juga nanti akan masuk dalam aspek pengawasan Komisi V.

Saya kira perkeretaapian, Dirjen Perkeretaapian mudah-mudahan sesuai janji Bapak, sesuai janji Pak Menteri mudah-mudahan kereta api Barru-Maros akan diresmikan oleh Presiden pada bulan-bulan yang akan datang, saya tidak tahu kapan waktunya ya. Tolong karena ini sudah tersebar, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik karena masyarakat sudah menunggu kapan dioperasikan kereta api tersebut. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan, terima kasih.

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Makasih, Pak Hamka. Cukup kali ya? Ya Pak, eh *sorry* Pak Syarief, Bu Cen ya? Jangan marahlah *sorry* jangan marah, habis ini Bu Cen. Ibu jangan marah Bu, duriannya nanti berhenti Bu, *sorry* Bu *sorry*.

F – P. NASDEM (H. SYARIEF ABDULLAH ALKADRIE, SH., MH):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,

Pimpinan Komisi V yang saya hormati,
Bapak Sekjen dan Bapak Dirjen Darat dan Perkeretaapian,
Rekan-rekan semuanya,

Yang pertama, karena ini saya harus menyampaikan ini berkaitan dengan penganggaran di 2023 setelah saya lihat tadi yang disampaikan. Karena ini bukan dapil saya Pak, tapi karena di sini tidak ada dari dapil NTT, kebetulan saya ini mendapat amanat untuk disampaikan berkaitan dengan rehabilitasi fasilitas pelabuhan penyebrangan Siba, Pak, kepulauan Sibu, ini daerah terluar ini. Kaitan dengan diterjangnya pada saat silkon, dilanda silkon badai Seroja waktu itu. Ini Pak Gubernur kemarin dan Pak Bupatinya menyampaikan ini, mohon perhatian. Sehingga ini harus saya sampaikan kepada Bapak kaitan dengan itu, mudah-mudahan itu bisa di menjadi prioritas, karena ini daerah yang sangat jauh.

Kemudian, saya kira berkaitan dengan program yang telah disampaikan 2023 ya tentu saya kira saya tidak perlu lagi mengulas panjang lebar, usulan sudah ada tinggal ya mudah-mudahan kita bisa melihat. Karena memang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang MD3 itu berkaitan dengan Anggota DPR punya kewajiban dalam rangka memperjuangkan daerah pemilihannya. Sehingga dengan demikian tentu usulan-usulan itu saya harap menjadi perhatian untuk teman-teman seluruhnyalah. Jangan cuma hanya hantarkan map *tau-tau* isinya *nggak* ada juga gitu. Padahal itu merupakan satu hal yang harus menjadi perhatian bagi kita semua.

Saya kira itu saja Pak Sekjen, Pak Dirjen berkaitan dengan ini. Saya kira terima kasih,

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Makasih Pak Syarief, Bu Cen silakan, Bu.

F – P. GERINDRA (CEN SUI LAN):

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Sorry Bu ya, jangan marah, Bu.

F – P. GERINDRA (CEN SUI LAN):

Diterima maafnya, Ketua.

Yang saya hormati Pimpinan dan teman-teman Komisi V,
Yang saya hormati Pak Dirjen, Pak Sekjen, Pak Plt. Dirjen,

Saya langsung ke Pak Dirjen Darat. Pak Dirjen, dengan anggaran 5,4 di Hubdat, masa di Kepri cuma dapat satu penyelesaiannya itu di Natuna, kami ini kan pulau terluar ada beberapa. Jadi, saya minta untuk pembangunan Dermaga Halte Kabupaten Lingga, itu kecamatan Katangbidara, Senayang dan Linggautara. Tapi Pak Dirjen, yang saya minta itu yang berbeda juga dengan yang saya kasih tadi, dua-dua harus diakomodir, jangan nanti dipilih salah satu ya Pak Dirjen, ya, masa 5,4 cuma dapat satu Pak Dirjen kan *nggak* bener itu.

Pak Dirjen, mengenai PJU *solarcell* dan konvensional dapat informasi itu yang *solarcell* nilainya sampai Rp68 Juta, konvensional Rp28 Juta. Padahal kita tahu yang *solarcell* itu di luar itu ada juga di Komisi lain 20-an juta lebih. Tapi di Hubdat ini mahal-mahal benar, makin mahal kan makin dikit kita, apa kriteria kok bisa mahal begitu, coba dipertimbangkan, dibandingkan dulu. Karena tidak semua Kabupaten itu bisa menerima konvensional, mereka dari Pemda tidak sanggup ikut membayar.

Itu saja saya, Pimpinan, untuk Pak Dirjen, Pak Plt. yang kereta api tidak ada karena di tempat saya *nggak* ada kereta api. Pak Sekjen, saya undang ke Batam kita jalan-jalan lihat navigasi, di situ bisa meningkatkan PNBP ya. Itu saja, Pimpinan, terima kasih.

Terima kasih semua.

KETUA RAPAT:

Makasih, Bu Cen. Ya jadi PJU saja, Bu, ya? Ya yang pendek-pendek saja *nggak* usah yang panjang-panjang kayak kereta ya. Iya PJU saja.

Silakan, Pak, selesai ya dari Anggota ya. Pak Andi Iwan, silakan. Pak Iwan nanti abis itu Pak Roberth.

F – P. GERINDRA (H. ANDI IWAN DARMAWAN ARAS, S.E., M.Si.) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Makasih, Pimpinan.

Pimpinan dan Anggota Komisi V yang saya hormati,
Pak Sekjen, Pak Dirjen Darat, Dirjen Perkeretaapian yang beserta jajaran yang saya hormati,

Saya tidak panjang Pak, hanya ingin menyampaikan ke Bapak menyangkut masalah kunjungan-kunjungan kerja Komisi V baik kunjungan kerja reses maupun kunjungan kerja spesifik. Setiap kali kami melakukan kunjungan itu tentunya didampingi oleh mitra kerja Komisi V termasuk dari Kementerian Perhubungan. Dalam setiap reses tersebut atau kunjungan

tersebut, kami biasanya didampingi atau di ikut dalam audiens itu adalah Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi. Yang mana mereka juga menyampaikan beberapa aspirasi-aspirasi yang nantinya tentunya akan kami sampaikan kepada Bapak selaku mitra kerja kami.

Saya ingin mempertegas bahwa beberapa hasil kunjungan kerja yang telah kami lakukan ternyata untuk di Dirjen Darat misalkan, Pak. Kami mengusulkan, kan berdasarkan hasil kunjungan kerja tersebut untuk pembangunan pelabuhan penyebrangan pulau Rao, pulau Rao-Daruba. Ini ternyata setelah saya melihat apa yang Bapak sampaikan masih belum terakomodir.

Dan, kemudian juga menyangkut masalah kunjungan kerja spesifik kami ke Kabupaten Pangkep tentang pulau-pulau terluar yang ada di Kabupaten Pangkep. Posisinya ini sama dengan Kabupaten Selayar yang disampaikan oleh Pak Hamka tadi. Pulau-pulau ini juga agak sulit untuk dilayani oleh Dirjen Perhubungan Laut, oleh apa namanya Sabuk Nusantara, Pak. Kami berharap mungkin dari darat sendiri bisa mengintervensi untuk pelabuhan penyebrangan. Karena ini sangat dibutuhkan dan itu cukup massif, Pak, penyeberangan itu. Mereka masyarakat kami ada kurang lebih 40.000 juta, *eh sorry* 40.000 jiwa di kecamatan-kecamatan terluar ini. Kecamatan ini berbatasan dengan Kalimantan Selatan, bahkan ada yang lebih dekat dengan pulau NTB-Lombok. Jadi, memang agak-agak perlu perhatian khusus kalau dari Sabuk Nusantara saja sudah tidak bisa meng *cover*. Kami harap bahwa dari Dirjen Darat juga bisa memperhatikan hal itu dan membuat mungkin studinya, Pak, terlebih dahulu. Kami sudah usulkan ke Bapak, mudah-mudahan untuk tahun depan sudah bisa mulai studi sehingga kemudian 2024 bisa mendapatkan pengalokasian anggaran.

Untuk Pak Dirjen Kereta Api, kami menunggu kapan Bapak jadwal peresmian tersebut untuk Maros-Barru, untuk Maros-Makassar kami *support* sepenuhnya ke Pak Dirjen Perkeretaapian tentang polemik yang ada di Sulawesi Selatan khususnya di Kota Makassar. Kami serahkan sepenuhnya secara teknis pelaksanaan dan saya terima kasih Pak Dirjen Perkeretaapian sudah mengalokasikan untuk pekerjaan pembangunan kereta api Maros-Makassar. Dan, secara teknis apapun itu tentunya Bapak yang lebih memahami dibandingkan masukan-masukan yang dari luar, boleh ditampung didengarkan masukannya tapi tidak perlu dilaksanakan kalau memang secara teknis menurut Bapak apa yang ada sekarang sudah cocok.

Kemudian, Pak Sekjen yang terakhir Pak, ini mungkin bukan di wilayah Bapak tapi saya minta mungkin bisa dimediasi. Menyangkut masalah *entry point* bandar udara internasional. Saat ini Menteri BUMN menyampaikan ada 10 bandara untuk *entry point* bandara udara internasional, bandara Sultan Hassanuddin *nggak* dimasukkin, Pak, saya *nggak* tahu pertimbangannya apa. Padahal kalau dipikir kita kalau persoalan jumlah warga negara asing, saya kira Sultan Hassanudin juga termasuk bandara yang cukup besar bahkan untuk umroh dan lain sebagainya kami termasuk salah satu Provinsi dengan jumlah jamaah yang terbanyak. Jadi, mohon dipertimbangkan kembali kenapa

kemudian dari 10 bandara yang ada di Indonesia, bandara Sultan Hassanuddin ini *nggak* dimasukkan.

Mungkin itu saja, Pimpinan, Pak Dirjen Darat. Mohon perhatian Bapak Pak khususnya yang Maluku Utara itu hasil kunjungan kerja reses kami. Kami *nggak* ingin ada kesannya PHP terhadap pemerintah Daerah ini. Terima kasih Pak Dirjen, makasih Ketua.

KETUA RAPAT:

Makasih Adinda Iwan, silakan, Pak Roberth.

F – P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Terima kasih, Pimpinan.

Pak Sekjen dan Para Dirjen yang saya hormati beserta seluruh jajaran, Teman-teman Komisi V,

Saya langsung saja saya ke Pak Sekjen, saya minta tolong Pak Sekjen tolong pertimbangkan penambahan moda transportasi perintis bersubsidi khususnya di daerah kami, lebih khusus di daerah Pegunungan Tengah karena ini daerah sangat susah. Karena, kita bicara angkutan pasti menyangkut bahan bakar, sekarang Pemerintah telah menaikkan harga bahan bakar. Ya, kalau di Jawa bahan bakar naik 2.000 orang demo tiap hari, di Papua kita beli 1 liter ada yang Rp50.000 tidak demo. Kami terima saja masyarakat Papua tidak pernah mempermasalahkan tentang kenaikan bahan bakar. Tapi, tolong perhatikan kami masyarakat Papua yang ada di daerah-daerah khususnya Pegunungan. Ini yang menjadi catatan kami agar nanti program di 2023 ini bisa disesuaikan untuk subsidi khususnya di daerah kami itu bisa ditambah karena kami sangat membutuhkan itu, apalagi angkutan antar pulau ya itu kami sangat mengalami tingkat kemahalan yang begitu tinggi.

Yang berikut, kepada Pak Dirjen Darat. Saya kira mungkin tadinya saya lihat-lihat *oh* tidak masuk. Ternyata waktu kami saya sampaikan itu masih Plt Bapak belum ada, makanya tidak, makanya sekarang saya ingatkan kembali. Yaitu di daerah saya di Kepulauan Yapen di Kampung Kolda distrik Windesi Kabupaten Kepulauan Yapen, kami membutuhkan pelabuhan penyebrangan. Dulu pernah dibangun ada, yaitu di sama di tempat tapi daerahnya di Saubeba. Itu dari lokasi yang ada itu ketempat yang dulu dibangun itu kira-kira sekitar 10 kilo.

Tetapi pelabuhan penyebrangan itu sejak dibuat sampai selesai tidak pernah digunakan karena bermasalah dan sekarang tinggal rangka-rangkanya saja, tidak pernah digunakan. Karena memang lokasinya tidak layak untuk dibangun di situ*, nah,* ini catatan. Dan, yang sekarang itu betul-betul lokasinya itu layak dan Pemerintah Daerah sudah bebaskan semuanya, jalan sudah sampai di sana, tinggal dari Kementerian. Makanya itu yang ingin saya sampaikan Pak Dirjen Darat, mudah-mudahan bisa terakomodir.

Yang berikut Pak Dirjen Darat, apa yang disampaikan Pak Syarif tadi. Karena saya juga sebagai Pimpinan Fraksi*, nah,* itu didatangi oleh Bupati dari Kabupaten Saburajuo tentang pelabuhannya yang kena dampak dari badai Seroja. *Nah*, ini saya kira sebenarnya harus menurut saya harusnya sudah masuk. Karena badai itu tahun 2021 ya, 2021 dan aset dari pelabuhan itu masih Kementerian, belum tidak diserahkan ke Pemerintah Daerah ya. Jadi, pembangunannya itu dia *multiyears* dari 2009 sampai 2014, sedangkan dia kena dampak siklon tropis Seroja itu pada bulan April tahun 2021 ya. Ini sudah makan korban Pak, ya terjadi insiden itu pada tanggal 5 Agustus 2022 truk yang muatan garam terbalik di depan pintu RAM itu masuk laut. Jadi mohon perhatian kalau bisa ini bisa terakomodir nanti untuk 2023. Itu saja Pimpinan, saya serahkan kembali ke Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik makasih, Pak Roberth, silakan, Pak Ridwan.

F – P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Sedikit saja saya Pak Ketua, langsung supaya pendek waktunya. Pak Dirjen saya lihat ini di kegiatan transportasi perairan ini tidak ada ini Sulawesi Tenggara saya lihat Pak Dirjen, iya, Sulsel juga tidak ada hahaha.

Iya yang lain-lain juga saya lihat Sulawesi Tenggara sangat minim ini. Jadi tolong Pak Dirjen ya, saya terima kasih sudah komunikasi telfon Pak Dirjen pada waktu itu waktu Bapak di Bali kalau saya tidak salah ya, terima kasih. Tapi, saya akan terima kasih lagi kalau Bapak memperhatikan Sulawesi Tenggara Pak, itu saja Pak, terima kasih, Pak.

KETUA RAPAT:

Ya.

F – P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Izin Pimpinan, mau menyerahkan.

KETUA RAPAT:

Oh, silakan, sebenarnya saya tunggu Bapak dari tadi *loh*, Pak. Iya silakan, Pak Roberth, silakan.

Baik, masih ada? Sudah ya Pak Willem? *Ndak* ya? Oh sudah? Oh sudah, oke nanti, ya baik.

F – PDIP (Dra. SRI RAHAYU):

Saya boleh izin sedikit, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Oh iya boleh, Bu, silakan.

F – PDIP (Dra. SRI RAHAYU):

Saya sudah daftar tadi tapi belum di ini, iya, terima kasih, Pimpinan.

Langsung saja, Pak, sekarang ini kan banyak terminal tipe A ya yang merupakan atau yang diambil dari punyanya Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Maksud saya begini, kedepan *public service* atau pelayanan publik terkait dengan apakah itu kereta api, apakah itu bus. Itu mutlak harus betul-betul mulai dari sekarang saat ini harus sudah diperhitungkan, bagaimana kedepan. Karena apa? Seiring dengan jumlah penduduk Republik Indonesia yang setiap tahunnya bertambah 6 juta ini tentu seiring dengan banyaknya kendaraan pribadi yang dipergunakan. Maka kebutuhan BBM akan terus meningkat dan itu harus dipikirkan dari sekarang. Oleh karena itu, solusinya adalah transportasi publik baik itu kereta api maupun bis atau apapun yang menjadi pelayanan publik. Oleh karena itu, harus dimulai dari tahun 2023 ini harus dimulai, itu yang pertama.

Yang kedua, saya tidak tahu arahnya ketika mengambil alih terminal menjadi tipe A ini yang menjadi kewenangan dari pusat ini. Yang pertama jelas banyak mengeluarkan biaya. Yang kedua, mungkin juga pelayanannya mungkin bisa ditingkatkan, yang jelas dari sudut fisik bangunan itu memang kalau dilihat enak. Lalu bagaimana dengan penerimaannya atau mungkin PNBP-nya, itu juga harus diperhitungkan. Bagaimana konsep kedepannya, yang mungkin sudah dilakukan atau belum dan perlu dilakukan untuk menganalisis, untuk melakukan apakah itu penelitian atau survei atau apa *monggo* silakan. Yang penting, jangan sampai ketika sudah dibangun bagus kemudian mangkrak karena biaya operasionalnya tinggi, itu menurut saya.

Yang terakhir, Pak, apa namanya, kereta api yang biasanya palang pintunya yang milik jalan nasional itu kan tugasnya perkeretaapian. Tetapi yang bukan itu kan biasanya Pemerintah Daerah*, nah.* Tolong itu jangan bosan-bosan untuk melakukan komunikasi koordinasi dengan Pemerintah Daerah, mana yang menjadi kewenangan ataupun tugas dari Pemerintah Daerah, karena itu sangat membahayakan bagi warga masyarakat. Seringkali jalan-jalan itu tidak ada, meskipun itu jalan ramai, itu tidak ada dari perkeretaapian yang punya tugas di situ karena alasannya adalah kewenangan daerah dan itu berbahaya, biasanya hanya sukarela saja orang-orang yang bertugas di situ. Menurut saya ini penting karena banyak jalan dan itu memang juga kadang-kadang yang disalahkan Kepala Daerah kan Pemerintah Daerah. Tolong itu komunikasi terus dilakukan supaya tidak terjadi kecelakaan di masyarakat. Saya kira itu Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Makasih, Bu Sri, cukup ya? Saya rasa cukuplah. Kita sudah soal 2023 ya teman-teman juga sampaikan usulan semua, tinggal kita lihat nanti progresnya seperti apa. Besok kita raker, ya. Yang sibuk-sibuk mungkin nanti dulu, kita mau simpulkan ini ya. Ya baik, Pak Sekjen, Pak Dirjen Darat dan Plt. Dirjen Kereta Api. Sekali lagi saya tegaskan, Pak.

Ya, APBN ini adalah kesepakatan bersama ya. Saya berharap supaya di hubungan kemitraan kita ini apa namanya, terjalin saling menghargai saling menghormati ya, selama tidak melanggar ketentuan aturan yang berlaku, ya. Ini saya tegaskan selama tidak melanggar aturan tertentu yang berlaku, wajib hukumnya menurut Undang-Undnag, pendapat, saran dan masukan Komisi V dan usulan-usulan lain yang memang menjadi domain kita dalam pembahasan ini. Termasuk juga penyampaian-penyampaian dari hasil kunjungan kerja baik pribadi, spesifik maupun kunjungan kerja Komisi V DPR RI yang selalu didampingi oleh teman-teman juga dari Kementerian Perhubungan.

Kemudian saya, yang lain-lain saya mungkin tidak terlalu ingin memperpanjang. Saya hanya soal DAK ini saja, Pak Sekjen ya Pak Dirjen tolong penempatannya ya mungkin juga dilihatlah. Saya ambil contoh saja di sini ada berapa orang Anggota Komisi V dari Sulawesi Selatan. Apakah memang di sana tidak ada yang layak terima DAK *gitu*? Nanti kan jadi pertanyaan. Karena DAK ini harusnya kriteria ini kita bahas Pak*, nah,* kriteria ini kan kita belum pernah bahas di sini. Nanti kalau kita bongkar kriteria-kriterianya kan jadi panjang nanti Pak Robi ya? Kan kalau kriteria itu kita harus bahas *loh,* Pak. Sehingga, daerah tersebut boleh mendapatkan DAK itu kriterianya harus jelas. Supaya dia tidak menjadi sesuatu yang subjektif penempatan DAK-nya, tapi objektif menurut aturan dan ketentuan yang berlaku. Sehingga, ada standar yang kita pahami bersama, sehingga itu dipandang perlu untuk dianggarkan melalui skema DAK. Kalau tidak apa namanya kan begitu ini ya, ini forum ini harus menyepakati itu.

Tapi sudahlah kami tidak masuk ke sana karena waktu kita sudah tidak terlalu banyak, besok kita sudah raker, kami serahkan sepenuhnya kepada Kementerian soal ini. Tapi ingat, tolong kriterianya itu diperjelas kemudian lokusnya tadi dengarkan teman-teman yang ada di sini Pak. Ini kan kalau misalnya iya *nggak* bisa banyak-banyak ya taruh lah satu-satu di teman-teman di seluruh, 50 berapa gitu ini Bu Nunik? 55 Anggota Komisi V ini taruh satu-satu DAK-nya di dapilnya kan *nggak* perlu kita berdebat lagi kita soal DAK ini gitu loh Pak. Kalau memang tidak melanggar aturan dan ketentuan berlaku, kriterianya memenuhi dan seterusnya. Saya juga harus garisi, Pak, garis bawahi soal aturan ini. Sehingga penempatannya itu tidak menjadi sesuatu yang subjektif juga kan gitu. Bisa kembalikan lagi, nanti kita lihat realisasinya seperti apa di rapat pengawasan berikutnya pasti akan kita pertanyakan kembali.

Kemudian yang pengawasan, Pak Sekjen, Pak Dirjen dan baik darat maupun perkeretaapian sudah saya jawab di…nanti saya kasih kesempatan sedikit-sedikit untuk *highlight* saja, mudah-mudahan jam 5 kita sudah bisa selesai ya. Saya kasih singkat-singkat saja terkhusus terkait dengan APBN

2023 saja. Di luar itu nanti kita di pengawasan kita akan sampaikan lebih detail, jadi *nggak* perlu dijawab soal pengawasan. Saya persilakan dulu, Pak Sekjen mungkin ada hal-hal yang perlu ditanggapi, tapi kalau juga tidak *nggak* apa-apa *gitu loh*, Pak, silakan.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI (Ir. NOVIE RIYANTO RAHARDJO, MSEA.):

Terima kasih, Bapak Ketua dan Bapak Wakil Ketua serta Bapak-Ibu sekalian di Komisi V,

Izin, menurut kami sudah kami catat semuanya, Bapak, dan sesuai arahan Pak Ketua tadi menurut kami tidak ada hal yang perlu ditanggapi dan kami akan tindak lanjuti apa yang sudah menjadi usulan Bapak-Ibu sekalian. Termasuk yang terakhir Pak, kita akan coba untuk sesuaikan, tapi juga kami mohon diberikan waktu Pak, karena menyesuaikan kita membutuhkan waktu juga. Demikian, terima kasih, Bapak.

KETUA RAPAT:

Baik, pasti, Pak.

F – PKS (Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO):

Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Pasti kita kasih waktu.

F – PKS (Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO):

Interupsi, Pak Ketua, sedikit saja.

KETUA RAPAT:

Ya silakan.

F – PKS (Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO):

Nggak sampai lima menit.

KETUA RAPAT:

Waduh, satu menit silakan, interupsi satu menit.

F – PKS (Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO):

Kita tetap butuh, saya tetap butuh jawaban dari Pak Sekjen ya. Walaupun nanti dijawab dalam tertulis, yang penting kami ini pingin tahu alasannya, dua itu, Pak. Yang pertama, PNBP Perhubungan Darat sekarang naiknya kecil sekali, apalagi dianggarkan hanya 633. Padahal tahun 2022 anggaran PNBP Perhubungan Darat itu 715. Apa sebabnya itu saja, yang mengganggu nalar saya karena sekarang sudah tidak covid. Dan kami berkunjung dua kali ke stasiun bis Pak di Bandung dan di ini. Itu semua dikontrak ini kan, apa namanya bisa dibuat untuk kegiatan komersial. Jadi saya kira kami butuh jawaban itu sehingga PNBP 2023 *wabil* khusus untuk Perhubungan Darat itu masuk akal gitu, Pak.

Yang kedua RPJM kereta *double track* sampai Surabaya itu tiba-tiba *nggak* ada sekarang Surabaya, sekarang sampai Sepanjang Pak, *gitu*. Jadi, mohon penjelasan yang masuk akal agar ya tidak bergelayut pertanyaan ini terus sampai tahun 2023. Terima kasih, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Makasih, Pak Sigit. Pak Sekjen ini nanti Bapak jawab tertulis, Pak, ya. Kalau Bapak jelasin sekarang juga kita tanya balik, nanti pasti *nggak nyambung* kita. Karena itu perlu data kan, Pak, harus detail Bapak jawabnya ini jawab tertulis. Nanti di rapat pengawasan lagi dengan Dirjen Perhubungan Darat ada Sekjen, tolong nanti apa yang disampaikan Pak Sigit dijawab. Karena PNBP ini memang sesuatu yang pernah kita bicarakan juga untuk kita akan dalami, di rapat pengawasan nanti tolong dijawab. Dan, sekarang tolong nanti dijawab tertulis ya Pak, yang ini ya, supaya detail jawabnya tidak *nanggung*.

F – P. DEMOKRAT (WILLEM WANDIK, S.Sos.):

Pak Ketua, Pak Ketua, *kulo nuwun,* Pak

KETUA RAPAT:

Silakan, jembatan

F – P. DEMOKRAT (WILLEM WANDIK, S.Sos.):

Menyerahkan usulan program

KETUA RAPAT:

Oh kira saya jembatan gantung tadi, silakan, Pak. Bukan *sorry*, jembatan timbang maksud saya silakan. Maklum, Pak, jembatan gantung saya belum diselesaikan, Pak, jadi ingatnya jembatan gantung kita. Kaka ganteng kali sore ini, ya terima kasih Kaka Willem. Baik, Pak Dirjen Perhubungan Darat, ada yang perlu ditanggapi silakan, Pak.

DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI (Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.):

Terima kasih.

Yang terhormat, Pak Ketua.

Pertanyaan ada 18 sudah kami catat, Pak, ditambah dengan 8 surat cinta yang akan saya buka nanti. Saya kira sudah saya catat, Pak, *insya Allah* nanti kami tindak lanjuti, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Pak Dirjen. PR, Pak, untuk raker besok mudah-mudahan sudah bisa diselesaikan, Bapak-Bapak bisa punya waktu. Pak Dirjen Perkeretaapian, silakan.

Plt. DIRJEN PERKERETAAPIAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI (ZULMAFENDI, S.E., M.Sc.):

Baik, terima kasih, Pak Pimpinan. Secara umum Pak, terkait tadi mengenai pintu perlintasan. Kebetulan memang di tahun 2023, Pak, kami ada kegiatan 222 titik Pak, jadi ini sudah terakomodir, Pak. Termasuk Bu Sadarestu tadi mengenai yang ke Jember ini, sebenarnya belum dilelang sebenarnya, baru nanti di akhir tahun ini kita lelang. Dan, yang lain-lain akan kami jawab secara tertulis Pak, demikian, Pak Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih Pak Plt. Dirjen Kereta Api. Saya rasa cukup ya, tidak perlu memberi tanggapan lagi, kita akan tanggapi di rapat pengawasan minggu berikut. Baik langsung saja kita tampilkan kesimpulan rapat.

Draf kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Sekjen, Dirjen Perhubungan Darat dan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Rabu, 7 September 2022.

1. Komisi V DPR RI meminta Sekjen, Dirjen Perhubungan Darat dan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan capaian serapan APBN Tahun 2022 sesuai saran dan masukan Komisi V DPR RI, di mana capaian per bulan Agustus 2022, sebagai berikut:

    - Sekretariat Jenderal, realisasi keuangan 62,64%. Realisasi fisik 65,50%.
    - Dirjen Perhubungan Darat, realisasi keuangan 51,45%. Realisasi fisik 51,45%.
    - Dirjen Perkeretaapian. Realisasi keuangan 47,01%. Realisasi fisik 47,01%.

2. Komisi V DPR RI memahami penjelasan Sekjen, Dirjen Perhubungan Darat dan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan mengenai

rencana kerja dan anggaran masing-masing unit organisasi Eselon I dalam RAPBN Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut:

- Sekretariat Jenderal, pagu kebutuhannya Rp1.353.480.374.000. Di nota keuangan Rp541.154.856.000. Sehingga ada *backlog* Rp812.325.518.000.
- Dirjen Perhubungan Darat, Pagu kebutuhan sebesar Rp14.084.711.615.000. Di nota keuangannya RAPBN Tahun 2023 Rp5.460.905.603.000. Sehingga, ada selisih atau *backlog* Rp8.623.806.012.000.
- Dirjen Perkeretaapian, Pagu kebutuhan Rp15.354.593.013.000. Di nota keuangan 2023 Rp7.274.665.225.000. Sehingga, ada *backlog* atau selisih Rp8.083.927.788.000.

3. Komisi V DPR RI bersama Sekjen, Dirjen Perhubungan Darat dan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan sepakat bahwa program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 diprioritaskan antara lain dari hasil kunjungan kerja dan masukan serta usulan Komisi V DPR RI.
4. Terkait dengan program kegiatan yang anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sektor Perhubungan Tahun 2023, Komisi V DPR RI meminta Sekjen Kementerian Perhubungan agar lokusnya disampaikan kepada Komisi V DPR RI.

Cukup?

(RAPAT: SETUJU)

Pak Sekjen?

(RAPAT: SETUJU)

Baik, terima kasih *applause* buat kita semua. Ya maka selesailah rapat kita pada siang sampai sore hari ini. Sebelum saya akhiri, saya beri kesempatan kepada Pak Sekjen mewakili Kementerian Perhubungan untuk menyampaikan kata-kata penutup.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI (Ir. NOVIE RIYANTO RAHARDJO, MSEA):

Terima kasih, Bapak Ketua.

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Yang terhormat Bapak Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota DPR RI Komisi V,

Pada kesempatan ini sekali lagi izinkan saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Pimpinan dan Anggota DPR RI Komisi V atas saran dan masukan dan pemikirannya dalam rangka penyusunan RKA K/L tahun 2023.

Semoga sinergi dan kolaborasi dalam kemitraan yang baik ini akan terus berlanjut demi peningkatan kinerja sektor transportasi nasional dan memberikan manfaat kepada masyarakat luas di seluruh Indonesia. Terima kasih, kami kembalikan Bapak.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Pak Sekjen Kementerian Perhubungan. Bapak-Ibu sekalian, saya atas nama Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi V Pak Sekjen juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran di rapat yang sangat komunikatif ini ya. Saya juga menyampaikan permohonan maaf manakala dalam rapat ini ada hal-hal yang kurang berkenan baik dari tutur kata maupun sikap yang dalam proses pembahasan ini semata-mata hanya demi kelancaran atau supaya rapat ini dapat menghasilkan sebuah keputusan yang berguna bagi bangsa dan negara ini. Saya akhiri rapat ini dengan mengucap syukur *alhamdulillah* ya, rapat saya tutup.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua.

(RAPAT DITUTUP PADA 17.00 WIB)

JAKARTA, 7 September 2022
a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

TTD

NUNIK PRIHATIN BUDIASTUTI, S.H.
NIP. 196912021998032002